



LAPORAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

RPIK

KABUPATEN BANGKA BARAT

2023-2043

...HAN TANJUNG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 ini dapat selesai dengan baik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 merupakan amanat yang tertuang pada Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui program-program pembangunan industri yang telah dirancang sehingga terwujud peningkatan kontribusi Industri pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 Penyusun berharap agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca serta program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai perencanaan.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dalam penyusunan dokumen ini tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu penyusun harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 ini.

Akhir kata Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya secara bersungguh-sungguh untuk kesempurnaan penyusunan dokumen ini.

Mentok, 12 Desember 2022

Hormat Kami,
Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, dengan ibukota Mentok. Wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak di antara 105° 00' - 106° 00' BT dan 01° 00' - 02° 10' LS. Total luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat yang meliputi daratan pulau utama dan pulau kecil adalah 2.851,00 Km dengan populasi penduduk pada tahun 2016 mencapai 200.684 jiwa dan tingkat kepadatan 70 jiwa/Km² serta luas wilayah laut kewenangan mencapai 2.024,38 Km². Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan. Salah satu batas Kabupaten Bangka Barat sebelah selatan dan barat, berbatasan dengan Selat Bangka dimana Selat Bangkaka merupakan tempat lalu lintas antara Pelabuhan Boom Baru Palembang (Sumsel), dan Kawasan Tanjung Siapi-api dengan Kepulauan Bangka Belitung.

Lokasi Kawasan Industri Pelabuhan Dan Industri Terpadu (KPIT) Bangka Barat mendukung pembangunan industri Kepulauan Bangka Belitung dimana Propinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam 5 Provinsi dari Wilayah Pengembangan Industri (WPI) 9 Sumatera Bagian Selatan yaitu nomor 26 dan belum memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Kabupaten Bangka Barat belum berada dalam WPPI tetapi berpotensi menjadi Kawasan industri (KI) yang meliputi KI Tanjung Ular dan KI Tanjung Kalian yang dapat menjalin sinergi dengan WPPI Banyuasin-Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan WPPI Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Kawasan Peruntukan Industri tercantum di dalam Perda RTRW Kabupaten Bangka Barat dan telah melewati pembahasan di DPRD yaitu pada Paragraf 6 Pasal 36 yang berbunyi:

1. Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas :
 - a) Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular seluas kurang lebih 1,275 ha
 - b) Kawasan Industri Tanjung Kalian seluas kurang lebih 138 ha.
2. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT).

Kabupaten Bangka Barat pula memiliki keunggulan komperatif berupa daerah yang dikelilingi lautan dengan kawasan pantai, dimana sebagian besar daratan adalah daratan rendah dan sebagian kecilnya adalah perbukitan. Tanah di wilayah mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, batu gunung, dan lain-lain. Selain itu tanah di Kabupaten Bangka Barat juga sangat

cocok untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat daya saing daerah dimana sektor industri pengolahan yang diikuti subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Konsentrasi sektor tersebar di dua sektor yaitu sektor tanaman perkebunan dan industri pengolahan. Berdasarkan komponen Pertumbuhan Regional (PR), sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kabupaten Bangka Barat bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Bangka Belitung adalah sektor industri pengolahan. Pertumbuhan Proporsional (PP) sebagian besar bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sektor relatif berkembang. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki daya saing yang tinggi dalam wilayahnya sendiri, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor pertambangan.

Daerah selama ini masih bertumpu pada sektor pertambangan mineral (timah dan logam tanah jarang) namun diperkirakan cadangan akan menipis dan habis jika ditambang secara terus menerus pada tahun 2043. Oleh sebab itu harus ada alternatif industri berbasis sumber daya alam unggulan yang dapat diperbaharui, yaitu industri berbasis agro perkebunan, hasil pertanian dan perikanan).

Kelemahan mendasar yakni dari segi kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan permodalan. Produk yang dihasilkan sekarang masih bersifat primer. Hasil perikanan sebagian besar diperdagangkan masih dalam bentuk ikan segar. Sebagian kelapa sawit dalam bentuk CPO dan kernel. Lada dan karet masih diperdagangkan dalam bentuk lada butiran dan getah karet.

Industri utama adalah Industri pangan, industri pengolahan kelapa sawit, lada dan karet. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Barat yang disepakati adalah terwujudnya industri pengolahan berbasis potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dari visi tersebut kemudian dijabarkan tiga misi, yakni:

1. Meningkatkan pembangunan industri pengolahan berbasis potensi daerah,
2. Meningkatkan sumber daya manusia industri yang unggul, handal dan kompetitif,
3. Membangun infrastruktur dan fasilitas Industri

Dalam membangun industri daerah yang direncanakan pada tahun 2043 telah mampu terwujud Industri yang tangguh dan mandiri dijabarkan menjadi 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan program-program detil pada lima tahun Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 DASAR HUKUM..... | 3 |
| 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN..... | 4 |
| BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI | 9 |
| 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN BATAS WILAYAH..... | 9 |
| 2.2 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN | 9 |
| 2.3 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN | 10 |
| 2.4 KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANGKA BARAT | 11 |
| 2.5 ZONA PERUNTUKAN DI PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA BARAT..... | 12 |
| 2.6 PERFORMA EKONOMI KABUPATEN BANGKA BARAT | 13 |
| BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN..... | 15 |
| INDUSTRI DAERAH..... | 15 |
| 3.1 VISI MISI DAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | 15 |
| 3.1.1 Visi..... | 15 |
| 3.1.2 Misi | 15 |
| 3.2 TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN | 16 |
| 3.3 SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN | 16 |
| BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH | 31 |
| 4.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI .. | 31 |
| 4.1.1 Strategi Pembangunan Industri | 31 |
| 4.1.2 Arah Kebijakan | 34 |
| 4.2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI..... | 37 |
| 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri..... | 76 |
| 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri..... | 79 |
| 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 82 |
| 4.2.5 Pemberdayaan Industri | 87 |
| BAB V PENUTUP..... | 95 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Kategori Unggulan Daerah (LQ) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020..... | 13 |
| Tabel 3. 1 Misi dan Tujuan Pembangunan Industri Daerah..... | 16 |
| Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Barat..... | 16 |
| Tabel 3. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026 | 18 |
| Tabel 4. 1 Analisa Kwadran SWOT Untuk Faktor Internal Industri di Kabupaten Bangka Barat..... | 32 |
| Tabel 4. 2 Analisa Kwadran SWOT Untuk Faktor Eksternal Industri di Kabupaten Bangka Barat..... | 33 |
| Tabel 4. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 – 2043..... | 35 |
| Tabel 4. 4 Peringkat Kepentingan 12 Kriteria | 40 |
| Tabel 4. 5 Tahapan Pengembangan Industri Unggulan | 44 |
| Tabel 4. 6 Nilai Produksi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (ton) | 46 |
| Tabel 4. 7 Total Nilai Produksi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (ton). 47 | |
| Tabel 4. 8 Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat... 48 | |
| Tabel 4. 9 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Bangka Barat..... | 49 |
| Tabel 4. 10 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Binatang Lunak di Kabupaten Bangka Barat..... | 52 |
| Tabel 4. 11 Kelompok Industri Pengolahan Ikan Diklasifikasikan Berdasarkan Klasifikasi Kelompok Pengusaha Indonesia (KLUI)..... | 53 |
| Tabel 4. 12 Nilai produksi Budidaya perikanan Air tawar Kabupaten Bangka Barat tahun 2016..... | 54 |
| Tabel 4. 13 Produksi Budidaya Perikanan Air laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016..... | 55 |
| Tabel 4. 14 Jenis industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 | 56 |
| Tabel 4. 15 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Ikan Tahun 2023– 2043 Kabupaten Bangka Barat..... | 57 |
| Tabel 4. 16 Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023- 2043 | 57 |
| Tabel 4. 17 Luas Lahan, Produksi, Produktivitas Lada dan KK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 | 59 |
| Tabel 4. 18 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Lada di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016..... | 60 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4. 19 Hasil Produksi Setiap Tahun di Kabupaten Bangka Barat 2021 | 60 |
| Tabel 4. 20 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Lada Tahun 2023 - 2038.... | 62 |
| Tabel 4. 21 Program Pengembangan Industri Pengolahan Lada Tahun 2023 - 2043. | 63 |
| Tabel 4. 22 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023 – 2038..... | 66 |
| Tabel 4. 23 Hasil Produksi Industri Pengolaan Kelapa Sawit Tahun 2016 - 2020..... | 67 |
| Tabel 4. 24 Program Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023- 2043..... | 68 |
| Tabel 4. 25 Produksi Karet Mentah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 (ton)..... | 70 |
| Tabel 4. 26 Sasaran industri berbasis komoditas karet | 71 |
| Tabel 4. 27 Program Pengembangan Industri Pengolahan Karet | 71 |
| Tabel 4. 28 Sasaran industri berbasis komoditas timah | 74 |
| Tabel 4. 29 Tabel Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 75 |
| Tabel 4. 30 Program Prioritas Pengembangan Pewilayahan Industri di Kabupaten Bangka Barat..... | 77 |
| Tabel 4. 31 Rencana Wilayah Pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten Bangka Barat..... | 78 |
| Tabel 4. 32 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023- 2043..... | 79 |
| Tabel 4. 33 Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tahun 2023-2043 | 80 |
| Tabel 4. 34 Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2023 - 2043 | 81 |
| Tabel 4. 35 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2023 – 2043..... | 81 |
| Tabel 4. 36 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2023 - 2043 | 82 |
| Tabel 4. 37 Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 | 83 |
| Tabel 4. 38 Program Penyediaan Lahan untuk Industri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 | 83 |
| Tabel 4. 39 Program Peningkatan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2023 – 2043..... | 84 |
| Tabel 4. 40 Program Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2023 - 2043 | 85 |
| Tabel 4. 41 Program Peningkatan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2023 - 2043 | 85 |
| Tabel 4. 42 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 – 2043 | 86 |
| Tabel 4. 43 Program Pembangunan Transportasi di Kabupaten Barat Tahun 2023 – 2043..... | 86 |
| Tabel 4. 44 Program Pembangunan Fasilitas Penunjang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023– 2043 | 87 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4. 45 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 | 88 |
| Tabel 4. 46 Program Pemberdayaan Industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 – 2026..... | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan (Sumber: Perda No. 3 Tahun 2020) | 9 |
| Gambar 2. 2 Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat (Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat dalam Angka 2021)..... | 10 |
| Gambar 4. 1 Bagan Industri Daerah Kabupaten Bangka Barat | 43 |
| Gambar 4. 2 Skema Tahapan Pengembangan IKM | 88 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang. Wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak di antara 105° 00'-106° 00'BT dan 01° 00'- 02° 10'LS. Total luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat yang meliputi daratan pulau utama dan pulau kecil adalah 2.851,00 Km² dengan populasi penduduk pada tahun 2016 mencapai 200.684 jiwa dan tingkat kepadatan 70 jiwa/km² serta luas wilayah laut kewenangan mencapai 2.024,38 Km.

Untuk membangun sektor industri dalam arena persaingan perekonomian nasional, sektor industri perlu memiliki daya saing berkelanjutan. Esensinya adalah pada upaya menggerakkan dan mengorganisasi seluruh potensi sumber daya untuk menghasilkan produk inovatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan pasar. Dalam pelaksanaannya, pembangunan sektor industri perlu dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya.

Misi pembangunan industri ke depan sebagaimana garis kebijakan Kementerian Perindustrian adalah mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. Industri masa depan bukan di Pulau Jawa. Secara perlahan sektor industri pengolahan non migas bergeser ke luar pulau Jawa. Sesuai dengan amanat Undang - undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan terwujudnya persebaran pemerataan dan penguatan industri. Pasal 11 menegaskan bahwa setiap bupati/walikota perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Bangka Barat Tahun 2023-2043 disusun untuk mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam 5 Provinsi dari Wilayah Pengembangan Industri (WPI) 9 Sumatera Bagian Selatan yaitu nomor 26 dan belum memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Kabupaten Bangka Barat belum berada dalam WPPI tetapi berpotensi menjadi Kawasan industri (KI) yang meliputi KI Tanjung Ular dan KI Tanjung Kalian yang dapat menjalin sinergi dengan WPPI Banyuasin-Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan WPPI Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Perwilayahan industri ini dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Sektor industri di Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah, dimana industrialisasi di Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing wilayah. Mengingat potensi wilayah Kabupaten Bangka Barat yang dikelilingi laut dan banyaknya pertanian dan perkebunan maka peningkatan produktivitas pertanian dan kelautan memang terus dilakukan, namun sejauh ini tidak memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi processing yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi processing guna mempertinggi nilai tambah hasil produksi pertanian dan kelautan bisa dilakukan melalui industri pengolahan. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar maka Pemerintah kabupaten Bangka Barat pantas menyiapkan regulasi jangka panjang menyiapkan strategi industrialisasi berbasis pertanian dan kelautan.

Tuntutan Standar industri di tingkat global yang menitikberatkan pada upaya efisiensi bahan baku, air dan energi, diversifikasi energi, eco-design dan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi limbah semakin tinggi. Indonesia bertekad untuk menetapkan kebijakan, kerangka peraturan dan kelembagaan yang mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah karbon atau dikenal dengan istilah industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya

mengutamakan upaya efisiensi dan penggunaan Tahun 2023-2043 ini selain dasar hukum, juga basis sumber daya unggul yang menjadi keunggulan komparatif daerah dan kondisi lingkungan sekitar juga tidak terlepas pada perencanaan makro sebagaimana terdapat pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi. RPIK Bangka Barat Tahun 2023-2043 menjadi payung terselenggaranya program - program percepatan, pemerataan dan penguatan industri sesuai dengan struktur industri guna menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing. Program-program pembangunan industri daerah dijabarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui strategi program yang menyelaraskan pada prinsip ketersediaan sumber daya industri, infrastruktur industri dan perangkat penunjang serta perencanaan dan penganggaran. Penjabaran program - program ini kemudian menjadi payung bagi unit kerja terkait yang berkontribusi dalam perwujudan pembangunan industri.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Penyusunan RPIK Kabupaten Bangka Barat 2023-2043 yaitu :

1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Bangka Barat tahun 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten.

1.2 Dasar Hukum

1.3 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

2.2 Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

2.3 Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah - langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

4.2 Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi.

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Program - program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan

transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

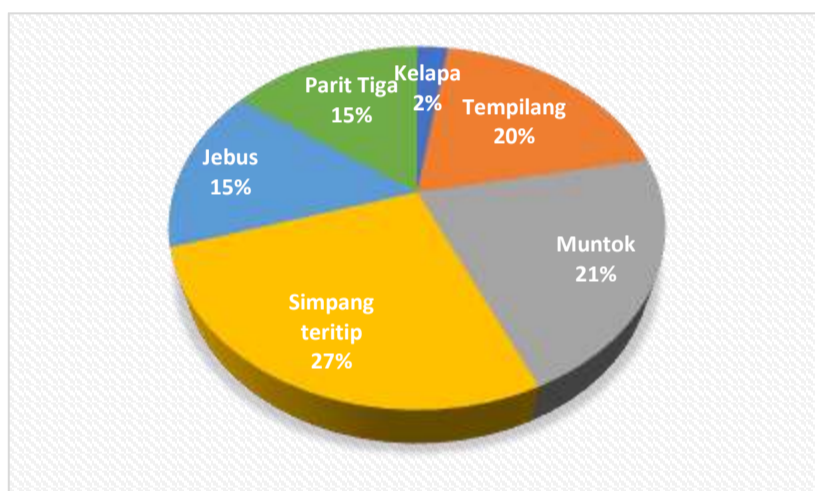
Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN BATAS WILAYAH

Wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak diantara $105^{\circ} 00' - 106^{\circ} 00'$ BT dan $01^{\circ} 00' - 02^{\circ} 00'$. Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah $\pm 285.100,90$ ha yang terdiri dari luas daratan utama $\pm 284.886,05$ ha dan luas daratan di pulau kecil $\pm 214,85$ ha. Wilayah administrasi terbagi enam kecamatan, enam kelurahan, 60 desa dan 177 dusun. Luas wilayah masing-masing kecamatan (Km^2) sebagai berikut: Kelapa $\pm 573,8$, Tempilang $\pm 461,02$, Mentok $\pm 505,94$, Simpang Teritip $\pm 637,35$, Jebus $\pm 351,93$, dan Paritiga $\pm 354,11$ (Gambar 2.1). Enam kelurahan terdiri dari Kelapa, Sungai Baru, Sungai Daeng, Tanjung, Keranggan, dan Menjelang.

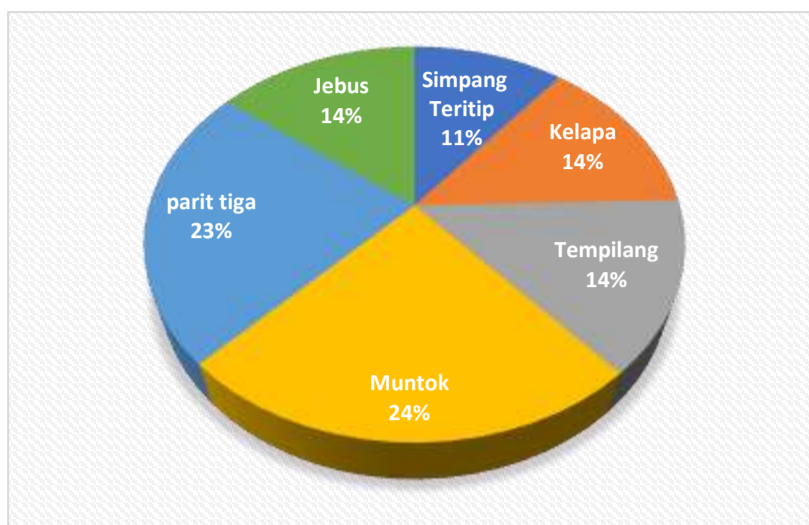


Gambar 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan (Sumber: Perda No. 3 Tahun 2020)

Batas wilayah Kabupaten Bangka Barat yakni: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, sebelah selatan dengan Selat Bangkaa, dan sebelah barat dengan Selat Bangkaa.

2.2 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah Kecamatan Mentok sebesar 24%, Parit Tiga 23%, Jebus 14%, Tempilang 14%, Kelapa 14%, dan Simpang Teritip 11% (Gambar 2.2). Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas (Angkatan kerja) 102.281 orang. Sedangkan bukan Angkatan kerja berjumlah 53.346 orang.



Gambar 2. 2 *Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat (Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat dalam Angka 2021)*

2.3 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN

Hierarki perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut: 1) Kota Mentok sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW); 2) Kota Kelapa dan Parit Tiga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pelangas, Air Putih, Jebus, Tempilang, Bakit dan Ibul sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Air Nyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayu Arang, Penyampak dan Sangku sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Penataan ruang bertujuan mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah berbasis pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan berazaskan keseimbangan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas: peningkatan kualitas fungsi pusat pelayanan, jaringan prasarana, kualitas lingkungan dan produktifitas Kawasan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri.

Sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, prasarana lingkungan dan prasarana lainnya. Rencana pola ruang wilayah terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya yang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, perkotaan dan pemukiman perdesaan dan peruntukan lainnya.

a) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Tanjung Ular ± 1.275 ha, dan kawasan industri disekitar Tanjung Kalian seluas ±139 ha.

b) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan diseluruh kecamatan, budidaya perikanan meliputi budidaya air tawar dan payau yang dikembangkan diseluruh kecamatan dengan luas ± 11.899 ha, dan pengolahan hasil perikanan berlokasi di Kecamatan Mentok, Tempilang, Simpang Teritip dan Parit Tiga.

Kawasan peruntukan perikanan didukung oleh adanya pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Mentok, serta Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.

c) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.

d) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan disetiap kecamatan seluas ± 15.812 ha, dan dari luas tersebut ± 11.099 ha berada di kawasan hutan; pertanian hortikultura terdapat disetiap kecamatan seluas ± 1.598 ha; perkebunan besar seluas ± 41.860 ha tersebar disetiap kecamatan dan perkebunan rakyat seluas ± 79.785 ha yang tersebar disetiap kecamatan; dan peruntukan peternakan di Kecamatan Kelapa, Mentok, dan Jebus seluas ± 72 ha.

e) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata tersebar diseluruh kecamatan, terdiri pariwisata alam dan pariwisata budaya.

f) Kawasan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan

Kawasan perkotaan dan perdesaan seluas ± 21.318 ha, terdiri dari Kawasan perkotaan seluas ± 9.331 ha dan permukiman perdesaan seluas 11.987 ha.

g) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas Kawasan peruntukan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian seluas ± 5 ha dan GOR ± 13 ha, Kawasan penyangga hutan konservasi diseluruh kecamatan Jebus dan Parittiga seluas ± 912 ha, kolong retensi di Kecamatan Mentok ± 113 ha, Kawasan transmigrasi di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kelapa seluas ± 855 ha, dan kawasan peruntukan lainnya.

2.4 KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan, meliputi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- a) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi: Kawasan kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan di Kecamatan Kelapa, Simpang Teritip, Tempilang, dan Jebus dan Parittiga; Kawasan perkotaan Mentok, meliputi Mentok Lama dan Mentok Baru sebagai pusat pelayanan utama wilayah, perdagangan dan jasa, wisata budaya dan transportasi; dan Kawasan Tanjung Kalian dan

sekitarnya, dengan fungsi pelabuhan penyeberangan, terminal, kawasan wisata, dan Kawasan industri.

- b) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni Kawasan kritis sekitar kolong yang tersebar di Kecamatan Mentok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.
- c) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, yakni Kawasan konservasi budaya Mentok Lama di Kecamatan Mentok.

2.5 ZONA PERUNTUKAN DI PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum di Kabupaten Bangka Barat terdiri atas zona pariwisata, pelabuhan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan industri. Sub zona wisata terdiri dari wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dan wisata alam bawah laut. Pengembangan zona peruntukan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut:

- a) Pengembangan zona wisata terdiri atas wisata alam pantai/ pesisir meliputi perairan Pantai Bembang, Perairan Pulau Batu Nunggal, Jebus, Pulau Tenung, Pulau Penaga dan sekitarnya, Perairan pantai Batu Rakit, Perairan Batu Ampar, Perairan Pulau Batungali, Bangau, Batu Payung, Batu Keruntong, Batukerak, Mentigi, Timah, Batualoy, Batutenam, Melala, Pantai Teluk Limau, Pala, Siangau dan sekitarnya, Pulau Kelapa, perairan Pantai Air Mas dan perairan Pantai Rambat, Perairan Teluk Kampa dan perairan Pantai Tungau, perairan Tanjung Resang, Tanjung Niur dan sekitarnya, dan pengembangan wisata alam bawah laut meliputi Karang Berang Berang.
- b) Pengembangan zona Pelabuhan, yakni sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan meliputi perairan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian, perairan Pantai Iklim, Teluk Rubiah dan sekitarnya.
- c) Pengembangan zona pertambangan mineral meliputi perairan Tanjung Batu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Biat dan sekitarnya, perairan Tanjung Ular dan sekitarnya, Tanjung Perigi Batu dan sekitarnya, perairan Tanjung kalian dan sekitarnya, perairan Laut Ranggam dan Laut Belo, perairan Pulau Manghiu, Batu Panjang, Asau, Mapat, Bedegum, Punai, Perut, Buta, Batu Udang, Ceper, Saman, Batutiung, Kebiung, Batu Bunter, Kelape Tengah, Lisum, Tenung, Penaga dan sekitarnya, perairan Teluk Kelabat luar dan sekitarnya, dan perairan Laut Tempilang.
- d) Pengembangan zona perikanan budidaya laut, meliputi perairan Teluk Kelabat dalam, perairan Desa Air Limau, Tanjung Pelanak, Air

Semugur, Muara Bendu, Tanjung Bendul, Tanjung Pegigibatu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Nipah, Air Nipah Besar, Air Nipah Besar dan sekitarnya, perairan Pulau Malanghiu, perairan Pulau Malangduyung, perairan Pulau Putri, Pulau Nanas, Pulau Nanas kecil, perairan Desa Semulut, Pulau Batupecah, Pulau Batubundek, Pulau Batubelujung dan sekitarnya, perairan Desa Kundi, Air Masar, Air Terabek kecil, Seberang dan sekitarnya, perairan Pulau Bambang dan sekitarnya, perairan Tanjung Genting, Tanjung Batubelayar, Tanjung Karang Merawang, Teluk Lebai, Teluk Kampa, Pulau Patok, Penaga dan sekitarnya.

- e) Pengembangan zona perikanan tangkap, yakni sub zona pelagis meliputi perairan Jebus, perairan Mentok, perairan Parit Tiga, dan perairan Simpang Teritip.
- f) Pengembangan zona industri, yakni sub zona industri pengolahan ikan meliputi perairan Tanjung Niur.

2.6 PERFORMA EKONOMI KABUPATEN BANGKA BARAT

Performa ekonomi wilayah pada umumnya digambarkan oleh PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 berdasarkan harga konstan menduduki urutan pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebesar Rp10.306 miliar.

Tabel 2. 1 Kategori Unggulan Daerah (LQ) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

| No | Kategori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sektor Primer | | | | | | | |
| A | Pertanian | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.69 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| Sektor Sekunder | | | | | | | |
| C | Industri Pengolahan | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 2.21 | 2.25 | 2.12 |
| D | Listrik, dan gas | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.44 |
| E | Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| F | Konstruksi | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.66 |
| Sektor Tersier | | | | | | | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| J | Informasi dan Komunikasi/Information | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi/ | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| L | Real Esta | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.52 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.68 |
| P | Jasa Pendidikan | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya/ | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis LQ pada periode 2016 -2020 (RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026), sektor perekonomian yang memiliki nilai sebesar 2,12 atau $LQ > 1$ adalah industri pengolahan/ manufacturing. Nilai $LQ > 1$ pada industri pengolahan adalah sama seperti periode sebelumnya 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut dapat dipenuhi dari Kabupaten Bangka Barat, bahkan dapat memenuhi kebutuhan daerah lain diluar Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, bahwa nilai industri logam dasar adalah tertinggi, yakni sebesar Rp5.941,7 – Rp6.682,1 miliar.

Analisis LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi sektor basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang dianggap menjadi pemicu pertumbuhan. Nilai LQ digunakan untuk identifikasi wilayah berdasarkan potensinya dengan melihat sektor basis di Kabupaten Bangka Barat dibandingkan di atasnya yakni Provinsi Bangka Belitung. Dasar perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Barat terhadap PDRB ADHK Provinsi Bangka Belitung.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH

3.1 VISI MISI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan industri yang menggambarkan arah pembangunan industri dimasa depan. Visi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dimana visinya adalah Bangka Barat Bersih, Mandiri dan Makmur 2025. Untuk bidang perindustrian visinya adalah :

“Terwujudnya industri pengolahan berbasis potensi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan “

a. Industri pengolahan berbasis potensi daerah

Berangkat dari potensi sumber daya alam Kabupaten Bangka Barat yang unggul Antara lain hasil tambang timah, logam ikutan timah (logam tanah jarang), bahan kaolin dan kuarsa, hasil perkebunan berupa sawit, karet, lada dan hasil perkebunan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.

b. Berdaya saing

Industri memiliki efisiensi dalam proses mampu untuk bertahan, sulit ditiru, dan dapat menguasai pasar dengan berbagai jenis produk unggulannya.

c. Berkelanjutan

Industri yang berlangsung terus menerus dan berkesnambungan sehingga dapat berlangsung hingga generasi selanjutnya.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentkan jalan yang akan ditempuh untk mencapai visi. Misi pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Meningkatkan pembangunan industri pengolahan berbasis potensi daerah

2. Meningkatkan sumber daya manusia industri yang unggul, handal, dan kompetitif
3. Membangun infrastruktur dan fasilitas industri.

3.2 TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Tujuan pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat merupakan pernyataan atas hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dalam membangun industri. Penjabaran tujuan pembangunan industri daerah dengan memperhatikan misi pembangunan industri dapat dilihat di Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Misi dan Tujuan Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Bangka Barat

| No | Misi | Tujuan |
|----|---|---|
| 1. | Meningkatkan pembangunan industri pengolahan berbasis potensi daerah | Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan |
| 2. | Meningkatnya sumber daya manusia industri yang unggul , handal dan kompetitif | Meningkatnya kemampuan kualitas sumber daya manusia industri dan keterlibatan pada industri |
| 3. | Membangun insfrastruktur dan fasilitas industri | Meningkatnya infrastruktur dan konektifitas mendukung pengembangan potensi daerah |

3.3 SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Sasaran merupakan apa yang hendak dicapai dengan target terukur yang merupakan penjabaran dan Tujuan. Adapun sasaran pembangunan industri terkait misi dan tujuannya, indicator kinerja keberhasilan pembangunan sector perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 dan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Bangka Barat dapat diliat dalam Tabel 3.2, dan Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Barat

| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|--|
| 1. | Meningkatkan pembangunan industri pengolahan berbasis potensi daerah | Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan | Meningkatnya produksi industri pengolahan komoditas unggulan |
| | | | Berkembangnya kawasan industri berbasis potensi daerah dan berwawasan lingkungan |
| | | | Meningkatnya kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan |
| 2. | Meningkatkan sumber daya manusia industri | Meningkatnya kemampuan kualitas sumber daya manusia | Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia berkulitas yang bekerja pada sector industri |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | yang unggul, handal dan kompetitif | industri dan keterlibatan pada industri | |
| 3. | Membangun infrastruktur dan fasilitas industri | Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah | Tersedianya infrastruktur dan akses konektivitas dalam kondisi baik |

Tabel 3. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1. Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Sarana Pertanian | % | 40 | 5 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 800.000.000 | 5 | 800.000.000 | 70 | 2.500.000.000 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | % | 40 | 1 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 51 | 4.000.000.000 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian | % | 92,59 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 550.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi | % | 20 | 20 | 20 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 300.000.000 | 30 | 300.000.000 | 30 | 300.000.000 | 30 | 1.100.000.000 |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase pengendalian izin usaha pertanian | % | 100 | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 160.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 180.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.260.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder | % | 34,40 | 38,43 | 38,43 | 500.000.000 | 42 | 500.000.000 | 46 | 1.000.000.000 | 50 | 1.000.000.000 | 54 | 1.000.000.000 | 54 | 4.000.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi Perikanan Tangkap | ton/tahun | 19.341 | 23.210 | 33.422 | 200.000.000 | 40.107 | 200.000.000 | 48.128 | 400.000.000 | 57.754 | 500.000.000 | 57.754 | 500.000.000 | 57.754 | 1.800.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya | ton/tahun | 105,81 | 126,97 | 182,84 | 100.000.000 | 219,41 | 100.000.000 | 263,29 | 250.000.000 | 315,95 | 250.000.000 | 315,95 | 350.000.000 | 315,95 | 1.050.000.000 |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku | % | 0 | 0 | 50 | 100.000.000 | 70 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 500.000.000 |
| PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam | % | 0 | 1,82 | 3,64 | 20.000.000 | 5,45 | 20.000.000 | 7,27 | 20.000.000 | 9,09 | 20.000.000 | 10,91 | 20.000.000 | 10,91 | 100.000.000 |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP yang berkategori sehat | % | 20 | 20 | 20 | 20.000.000 | 30 | 20.000.000 | 30 | 20.000.000 | 30 | 50.000.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 160.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit | % | 4,57 | 4 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 660.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKH | persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan | % | 3,28 | 3,45 | 3,45 | 200.000.000 | 3,45 | 200.000.000 | 3,45 | 500.000.000 | 3,45 | 500.000.000 | 3,45 | 500.000.000 | 3,45 | 1.900.000.000 |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | % | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 20.000.000 | 19,23 | 20.000.000 | 19,23 | 100.000.000 | 75 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 440.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi yang melaksanakan RAT | % | 49,18 | 49,18 | 50 | 20.000.000 | 50,82 | 20.000.000 | 51,64 | 50.000.000 | 52,46 | 50.000.000 | 53,28 | 50.000.000 | 53,28 | 190.000.000 |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI | Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang- undangan | % | 57,69 | 57,69 | 58,65 | 550.000.000 | 59,62 | 550.000.000 | 60,58 | 550.000.000 | 61,54 | 550.000.000 | 62,50 | 550.000.000 | 62,50 | 2.750.000.000 |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Sentra IKM | sentra | 9 | 9 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 14 | 800.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah | % | N/A | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI | % | 4 perusaha an | 4 perusahaan | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 30 perusahaan | 400.000.000 |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Pembinaan Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Bagi Usahaperikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | % | 10 | 10 | 15 | 100.000.000 | 18 | 100.000.000 | 20 | 200.000.000 | 23 | 300.000.000 | 25 | 400.000.000 | 25 | 1.100.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan | % | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 550.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Peningkatan jumlah DTW | DTW | 5 | 5 | 6 | 1.200.000.000 | 7 | 1.200.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 9 | 2.000.000.000 | 10 | 2.000.000.000 | 10 | 8.400.000.000 |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Peningkatan kunjungan wisatawan | Jumlah | 67.648 | 50.000 | 50.000 | 400.000.000 | 100.000 | 400.000.000 | 100.000 | 500.000.000 | 100.000 | 600.000.000 | 100.000 | 800.000.000 | 567.468 | 2.700.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | % | 20 | - | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.050.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HakI | % | - | - | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.050.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan | % | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 500.000.000 | 15,13 | 500.000.000 | 15,13 | 1.000.000.000 | 15,13 | 1.200.000.000 | 15,13 | 1.200.000.000 | 15,13 | 4.400.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah | jumlah | 1 | 1 | 1 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 1.300.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi | jumlah | 1 | 1 | 2 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 1.000.000.000 |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 50 | 50 | 54,17 | 350.000.000 | 50 | 350.000.000 | 46,88 | 850.000.000 | 44,44 | 1.000.000.000 | 42,50 | 1.000.000.000 | 42,50 | 3.550.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase museum dalam kondisi baik | % | - | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 350.000.000 |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 4 | 290.000.000 |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Peningkatan jumlah kerjasama stakeholder dalam pemanfaatan Tahura | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 6 | 500.000.000 | 6 | 500.000.000 | 8 | 500.000.000 | 24 | 2.500.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur | % | 16,67 | 16,67 | 33,33 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 66,67 | 100.000.000 | 83,33 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 340.000.000 |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100.000.000 | 3,9 | 100.000.000 | 3,9 | 100.000.000 | 3,9 | 100.000.000 | 3,9 | 100.000.000 | 3,9 | 500.000.000 |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase rekomendasi yang diterbitkan | % | N/A | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 160.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | % | N/A | N/A | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 500.000.000 |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok) | % | N/A | N/A | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 340.000.000 |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang | % | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 500.000.000 |
| 1.1.2 Meningkatkan Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan layanan penanaman modal | % | 173 investor | 9,83 | 8,95 | 100.000.000 | 8,21 | 100.000.000 | 7,59 | 100.000.000 | 7,05 | 100.000.000 | 6,59 | 100.000.000 | 275 investor | 500.000.000 |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal | Indeks | 80 | 80 | 81 | 100.000.000 | 81 | 100.000.000 | 82 | 150.000.000 | 82 | 150.000.000 | 83 | 150.000.000 | 83 | 650.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM | % | 10 | 15 | 17,5 | 20.000.000 | 21 | 20.000.000 | 24 | 50.000.000 | 27 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 190.000.000 |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal. | % | N/A | N/A | 65 | 300.000.000 | 70 | 300.000.000 | 72 | 500.000.000 | 74 | 800.000.000 | 76 | 800.000.000 | 76 | 2.700.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang | % | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 300.000.000 | 28,57 | 300.000.000 | 42,85 | 400.000.000 | 57,14 | 600.000.000 | 71,42 | 600.000.000 | 71,42 | 2.200.000.000 |
| 1.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap | % | 79,29 | 81,37 | 81,77 | 12.000.000.000 | 82,17 | 12.000.000.000 | 82,57 | 25.000.000.000 | 82,97 | 25.000.000.000 | 83,37 | 25.000.000.000 | 83,37 | 99.000.000.000 |
| | Persentase jembatan dalam kondisi baik | % | 89,29 | 89,93 | 94,55 | | 95,28 | | 95,82 | | 96,28 | | 97,37 | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ | % | 16,94 | 16,94 | 21,36 | 1.200.000.000 | 25,77 | 1.200.000.000 | 30,19 | 1.800.000.000 | 34,60 | 2.000.000.000 | 39,02 | 2.000.000.000 | 39,02 | 8.200.000.000 |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan | % | N/A | N/A | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 320.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
|--|---|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Santunan Tanah untuk Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan | % | N/A | 20 | 40 | 40.000.000 | 50 | 40.000.000 | 67 | 80.000.000 | 84 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 320.000.000 |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah | % | N/A | N/A | 12 | 40.000.000 | 24 | 40.000.000 | 49 | 80.000.000 | 75 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 320.000.000 |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN | Persentase senketa tanah garapan yang terselesaikan | % | N/A | N/A | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 240.000.000 |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani | % | 85,49 | 85,49 | 86 | 14.800.000.000 | 87 | 29.800.000.000 | 87 | 4.800.000.000 | 88 | 4.800.000.000 | 89 | 4.800.000.000 | 89 | 59.000.000.000 |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan | % | 0 | 0 | 30 | 300.000.000 | 35,71 | 300.000.000 | 37,50 | 500.000.000 | 43,75 | 500.000.000 | 50 | 500.000.000 | 50 | 2.100.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi | % | 186 orang | 0 | 21,51 | 100.000.000 | 22,12 | 100.000.000 | 18,12 | 200.000.000 | 15,34 | 200.000.000 | 13,30 | 200.000.000 | 426 orang | 800.000.000 |
| 1.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | % | 9 | 18 | 36 | 200.000.000 | 55 | 200.000.000 | 73 | 200.000.000 | 91 | 200.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 1.400.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 | % | 0 | 0 | 13 | 30.000.000 | 33 | 30.000.000 | 53 | 30.000.000 | 73 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 150.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL- UPL) | % | 46 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 440.000.000 |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup | % | 100 | 100 | - | - | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 60.000.000 |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan | % | 0 | 16 | 16 | 40.000.000 | 16 | 40.000.000 | 16 | 40.000.000 | 22 | 60.000.000 | 22 | 60.000.000 | 22 | 240.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 1.500.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola | % | - | - | 33,33 | 25.000.000 | 41,67 | 25.000.000 | 50,00 | 25.000.000 | 58,33 | 25.000.000 | 66,67 | 25.000.000 | 66,67 | 125.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatf | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah sampah yang dikelola | Ton/ta hun | 5.103,90 | 5.338,86 | 5.157,29 | 8.000.000.000 | 5.208,86 | 6.000.000.000 | 5.260,95 | 7.000.000.000 | 5.313,56 | 7.000.000.000 | 5.366,70 | 7.000.000.000 | 5.366,70 | 35.000.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST) | % | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 100.000.000 | 28,57 | 100.000.000 | 42,86 | 200.000.000 | 57,14 | 300.000.000 | 71,43 | 300.000.000 | 71,43 | 1.000.000.000 |
| ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase PendudukYang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 6 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 3.200.000.000 |
| | Persentase PendudukYang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 9 | 100 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | |
| | Persentase PendudukDi Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | % | 6 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait | % | 16 | 16 | 16 | | 32 | | 48 | | 64 | | 80 | | 80 | 2.300.000.000 |
| | Layanan Pemadamanyang dilakukan oleh kelompok relawan | % | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 25 | 300.000.000 | 50 | 500.000.000 | 75 | 600.000.000 | 100 | 600.000.000 | | |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisimembahayakan manusia (Operasi non Kebakaran) | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase titik banjiryang dimitigasi | % | 42,22 | 46 | 50 | 1.000.000.000 | 54 | 1.000.000.000 | 58 | 1.500.000.000 | 62 | 1.500.000.000 | 66 | 1.500.000.000 | 66 | 6.500.000.000 |
| 1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.600.000.000 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas | % | 100 | 100 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.800.000.000 | 100 | 2.800.000.000 | 100 | 12.700.000.000 |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | persentase korban bencana yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.700.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yangaktif | % | 100 | 100 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 3.200.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat | % | N/A | 100 | 100 | 4.800.000.000 | 100 | 4.800.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 24.600.000.000 |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penanganan daerahrawan pangan | % | 33 | 50 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 50 | 120.000.000 | 100 | 600.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
|---|---|-------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|-----------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | tingkat konsumsi pangan AKE | kcal/kap/hr | 2.202 | 2.100 | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 400.000.000 |
| | tingkat konsumsi pangan AKP | gr/kap/hr | 67,53 | 57 | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | | |
| | Tingkat ketersediaan pangan AKE | kcal/kap/hr | 1.129 | 1.186 | 1.245 | 80.000.000 | 1.307 | 80.000.000 | 1.372 | 80.000.000 | 1.440 | 80.000.000 | 1.656 | 80.000.000 | 1.656 | | |
| | Tingkat ketersediaan pangan AKP | gr/kap/hr | 57,10 | 58,00 | 59,00 | | 60,00 | | 61,00 | | 62,00 | | 63,00 | | 63,00 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan | % | 40 | 40 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 160.000.000 | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman | % | 90 | 90 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 350.000.000 | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 840.000.000 | |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani | % | 3.613 RTLH | 5,67 | 11,74 | 200.000.000 | 13,30 | 200.000.000 | 15,34 | 400.000.000 | 18,12 | 500.000.000 | 22,12 | 800.000.000 | 1.408 RTLH | 2.100.000.000 | |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani | % | 167 RTLH | 4,19 | 3,13 | 400.000.000 | 3,23 | 400.000.000 | 3,33 | 400.000.000 | 3,45 | 400.000.000 | 3,57 | 400.000.000 | 135 RTLH | 2.000.000.000 | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan | % | 0 | 8,3 | 8,3 | 250.000.000 | 16,7 | 250.000.000 | 16,7 | 500.000.000 | 25 | 800.000.000 | 25 | 800.000.000 | 25 | 2.600.000.000 | |
| 1.2.2 Menurunnya Angka Pengangguran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 25 | 30 | 35 | 400.000.000 | 40 | 400.000.000 | 45 | 400.000.000 | 50 | 400.000.000 | 55 | 400.000.000 | 55 | 2.000.000.000 | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan | % | 31 | 33 | 35 | 20.000.000 | 35 | 20.000.000 | 36 | 20.000.000 | 36 | 20.000.000 | 36 | 20.000.000 | 36 | 100.000.000 | |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan | % | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 250.000.000 | |
| 2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | % | 95,09 | 95,35 | 95,60 | | 95,85 | | 96,15 | | 96,40 | | 96,75 | | 96,75 | 209.350.000.000 | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 15 tahun dalam Pendidikan dasar | % | 94,37 | 94,62 | 94,87 | 40.050.000.000 | 95,12 | 40.050.000.000 | 95,32 | 41.050.000.000 | 95,57 | 43.100.000.000 | 95,82 | 45.100.000.000 | 95,82 | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | % | 5,01 | 95,04 | 95,09 | | 95,14 | | 95,20 | | 95,25 | | 95,30 | | 95,30 | | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar | % | 69,68 | 69,68 | 70,54 | 50.000.000 | 70,85 | 50.000.000 | 71,25 | 50.000.000 | 71,25 | 100.000.000 | 71,25 | 100.000.000 | 71,25 | 350.000.000 | |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal | % | - | - | - | 50.000.000 | 35 | 50.000.000 | 45 | 50.000.000 | 65 | 100.000.000 | 75 | 100.000.000 | 75 | 350.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B | % | 15,16 | 28,08 | 38,89 | 200.000.000 | 46,84 | 200.000.000 | 54,80 | 200.000.000 | 65,61 | 400.000.000 | 75,67 | 400.000.000 | 75,67 | 1.400.000.000 |
| | Akreditasi perpustakaan daerah | nilai | - | - | - | | - | | A | | A | | A | | | |
| | Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B | % | 3,85 | 5,77 | 11,54 | | 15,38 | | 21,15 | | 26,92 | | 32,69 | | 32,69 | |
| | Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | % | 5,40 | 1,01 | 10,43 | | 10,43 | | 10,43 | | 10,43 | | 10,43 | | 10,43 | |
| 2.1.2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase capaian SPM bidang kesehatan | % | 91,50 | 91,80 | 92 | 75.000.000.000 | 93 | 75.000.000.000 | 95 | 77.000.000.000 | 97 | 80.000.000.000 | 100 | 82.000.000.000 | 100 | 389.000.000.000 |
| | Tingkat Kepuasan layanan puskesmas | Nilai | 79,50 | 79,80 | 80 | | 80,50 | | 81 | | 81,50 | | 82 | | | |
| | Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit | Nilai | 76,80 | 76,90 | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | | |
| | Persentase baduta stunting | % | 9,70 | 9,60 | 9,50 | | 9 | | 8,50 | | 8 | | 7,5 | | | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin | % | 72 | 73 | 75 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 85 | 500.000.000 | 88 | 500.000.000 | 90 | 500.000.000 | 90 | 1.700.000.000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk | Jumlah | N/A | N/A | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | - | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 220.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | Angka | 79,18 | 79,48 | 79,78 | 500.000.000 | 80,08 | 500.000.000 | 80,38 | 500.000.000 | 80,68 | 600.000.000 | 80,98 | 600.000.000 | 80,98 | 2.700.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS | % | 39,40 | 39,60 | 40 | 50.000.000 | 45 | 50.000.000 | 50 | 100.000.000 | 55 | 150.000.000 | 60 | 150.000.000 | 60 | 500.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 30.000.000.000 |
| | Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar | % | 50 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM) | % | 12,21 | 12,77 | 15 | 200.000.000 | 17,78 | 200.000.000 | 23,70 | 1.000.000.000 | 25,68 | 1.000.000.000 | 27,66 | 1.000.000.000 | 27,66 | 3.400.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak | % | N/A | N/A | 2,74 | 500.000.000 | 3,59 | 500.000.000 | 4,72 | 800.000.000 | 5,83 | 800.000.000 | 6,91 | 800.000.000 | 6,91 | 3.400.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN | Persentase sistem drainase dalam kondisi baik | % | 80,85 | 80,85 | 81,66 | 200.000.000 | 82,47 | 200.000.000 | 83,28 | 200.000.000 | 84,09 | 200.000.000 | 84,90 | 200.000.000 | 84,90 | 1.000.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------|------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| SISTEM DRAINASE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Pencab Aktif | Jumlah | 27 | 27 | 27 | 8.000.000.000 | 28 | 8.500.000.000 | 29 | 2.500.000.000 | 30 | 2.500.000.000 | 30 | 2.500.000.000 | 30 | 24.000.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif | % | 78,28 | 78,5 | 78,7 | 200.000.000 | 79 | 200.000.000 | 79,4 | 400.000.000 | 79,7 | 500.000.000 | 80 | 500.000.000 | 80 | 1.800.000.000 |
| | persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK | % | 65 | 70 | 75 | | 80 | | 83 | | 87 | | 90 | | 90 | |
| 2.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan | % | N/A | 20 | 30 | 100.000.000 | 40 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 65 | 150.000.000 | 80 | 200.000.000 | 80 | 650.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase ketersediaan informasi gender dan anak | % | N/A | 50 | 55 | 20.000.000 | 60 | 20.000.000 | 70 | 50.000.000 | 80 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 190.000.000 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | % | N/A | N/A | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 800.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak | % | 60 | 65 | 70 | 150.000.000 | 75 | 150.000.000 | 80 | 350.000.000 | 85 | 500.000.000 | 90 | 500.000.000 | 90 | 1.650.000.000 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak | % | 55 | 60 | 70 | 50.000.000 | 75 | 50.000.000 | 80 | 100.000.000 | 85 | 150.000.000 | 90 | 150.000.000 | 90 | 500.000.000 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif | % | N/A | N/A | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 650.000.000 |
| 2.1.4 Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 6.800.000.000 | 100 | 6.800.000.000 | 100 | 7.300.000.000 | 100 | 8.300.000.000 | 100 | 8.300.000.000 | 100 | 37.500.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka | Jumlah | 3 | 5 | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 10 | 300.000.000 | 44 | 1.500.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan | % | 25 | 30 | 35 | 700.000.000 | 40 | 700.000.000 | 45 | 700.000.000 | 50 | 700.000.000 | 55 | 700.000.000 | 55 | 3.500.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah komunitas pencinta lingkungan | jumlah | 14 | 14 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 19 | 160.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan | % | 100 | 100 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 8.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 26.500.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga. | % | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 500.000.000 |
| PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi | Kasus | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 |
| PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 5.900.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | persentase ormas yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 290.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya | Kasus | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 500.000.000 |
| PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | persentase potensi konflik sosial yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 1.000.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 420.000.000 | 100 | 420.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 540.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 2.460.000.000 |
| 3.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | 413.800.000.000 | 100 | 428.800.000.000 | 100 | 448.800.000.000 | 100 | 468.800.000.000 | 100 | 488.800.000.000 | 100 | 2.249.000.000.000 |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah | % | 80,18 | 74,09 | 100 | 750.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 5.700.000.000 |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 89,47 | 82,76 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 11.700.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | % | 65,15 | 59,02 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 71,43 | 65,79 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah | % | 100 | 66,67 | 90 | 500.000.000 | 90 | 500.000.000 | 90 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 3.400.000.000 |
| | Jumlah Inovasi Daerah | Jumlah | 0 | 0 | 5 | | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | | 15 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi. | % | 50 | 60 | 65 | 250.000.000 | 70 | 250.000.000 | 75 | 400.000.000 | 80 | 400.000.000 | 85 | 400.000.000 | 85 | 1.700.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 117.122.645.830 | 100 | 123.028.174.613 | 100 | 125.610.768.384 | 100 | 128.004.458.467 | 100 | 130.500.573.889 | 100 | 624.266.621.182 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan | % | 100 | 100 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 3.000.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | indeks manajemen resiko | Indeks | 1,41 | 1,50 | 1,60 | | 1,70 | | 1,80 | | 1,90 | | 2 | | 2 | 13.100.000.000 |
| | Indeks efektivitas pengendalian korupsi | Indeks | - | - | 1 | 2.500.000.000 | 1,1 | 2.500.000.000 | 1,2 | 2.700.000.000 | 1,3 | 2.700.000.000 | 1,4 | 2.700.000.000 | 1,4 | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Level Kapabilitas APIP | level | 2+ | 2+ | 2+ | 300.000.000 | 2+ | 300.000.000 | 2+ | 300.000.000 | 2+ | 300.000.000 | 2+ | 300.000.000 | 2+ | 1.500.000.000 |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | 28.000.000.000 | Ada | 28.800.000.000 | Ada | 30.000.000.000 | Ada | 30.500.000.000 | Ada | 31.000.000.000 | Ada | 148.300.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman | % | 3,3 | 3,3 | 20 | 100.000.000 | 40 | 100.000.000 | 60 | 200.000.000 | 80 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 800.000.000 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK | Jumlah | N/A | - | 1 | 80.000.000 | - | 80.000.000 | 1 | 180.000.000 | - | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 700.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | Tema | N/A | - | 1 | - | | | 1 | | - | | 1 | | 3 | |
| | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | % | N/A | 4,55 | 4,76 | 5 | | 5,26 | | 5,26 | | 5,88 | | 5,88 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip | % | 10,34 | 10,34 | 30 | 50 | | 70 | | 83,33 | | 90 | | 90 | | |
| | Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip | % | 18,18 | 5,56 | 5,88 | 50.000.000 | 6,25 | 50.000.000 | 6,67 | 140.000.000 | 7,69 | 140.000.000 | 8,33 | 140.000.000 | 8,33 | 520.000.000 |
| | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | % | N/A | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI) | % | N/A | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK | Kali | N/A | 2 | 4 | 20.000.000 | 7 | 20.000.000 | 9 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 14 | 30.000.000 | 48 | 130.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE | % | 9 | 14 | 20 | 1.200.000.000 | 40 | 1.200.000.000 | 60 | 1.500.000.000 | 80 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 6.900.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan | Jumlah | 500 | 600 | 720 | 2.000.000.000 | 840 | 2.000.000.000 | 960 | 2.200.000.000 | 1.080 | 2.200.000.000 | 1.200 | 2.200.000.000 | 5.900 | 10.600.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki | % | 55,12 | 62,68 | 68,11 | | 74,43 | | 80,17 | | 85,47 | | 88,47 | | 88,47 | |
| | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya | Orang | 390 | 405 | 420 | 1.000.000.000 | 435 | 1.000.000.000 | 450 | 1.500.000.000 | 465 | 1.500.000.000 | 480 | 1.500.000.000 | 480 | 6.500.000.000 |
| | Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir | Orang | 1.242 | 1.392 | 1.592 | | 1.742 | | 1.942 | | 2.092 | | 2.242 | | 2.242 | |
| PROGRAM | Persentase PNS yang | % | 94,46 | 94,72 | 95,02 | 1.500.000.000 | 95,42 | 1.500.000.000 | 95,42 | 1.500.000.000 | 95,42 | 1.500.000.000 | 96,22 | 1.500.000.000 | 96,22 | 7.500.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| KEPEGAWAIAN DAERAH | memiliki nilai kinerja ≥76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat | Orang | 41 | 40 | 38 | | 37 | | 35 | | 33 | | 30 | | 30 | |
| | Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II | Orang | 73 | 74 | 75 | | 77 | | 78 | | 82 | | 83 | | 83 | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 2.000.000.000 |
| | Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 1.500.000.000 |
| 3.1.2 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan | % | 74,55 | 75,70 | 79,50 | 300.000.000 | 83,30 | 300.000.000 | 87,10 | 500.000.000 | 90,90 | 500.000.000 | 94,70 | 500.000.000 | 94,70 | 2.100.000.000 |
| PROGAM PENCATATAN SIPIIL | Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil | % | 63,045 | 64,544 | 66,01 | 50.000.000 | 67,51 | 50.000.000 | 68,95 | 100.000.000 | 70,43 | 100.000.000 | 71,95 | 100.000.000 | 71,95 | 400.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase ketersediaan data kependudukan | % | 33,33 | 33,33 | 46,67 | 50.000.000 | 66,67 | 50.000.000 | 80 | 70.000.000 | 93,33 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 330.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase ketersediaan profil kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 5.000.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 360.000.000 | 100 | 360.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 540.000.000 | 100 | 540.000.000 | 100 | 2.280.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif | % | 50 | 65 | 70 | 800.000.000 | 75 | 800.000.000 | 80 | 900.000.000 | 85 | 900.000.000 | 90 | 900.000.000 | 90 | 4.300.000.000 |
| PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa | % | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 420.000.000 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik | % | 33 | 50 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 3.100.000.000 |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tingkat kematangan UKPBJ | level | 3 | 3 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 5 | 300.000.000 | 5 | 350.000.000 | 5 | 1.300.000.000 |

| Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Capaian dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
|---|--|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.2 Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase peningkatan pajak daerah | % | Rp20.610. 403.491 | Rp27.797. 500.000 | 3,96 | | 3,80 | | 3,67 | | 3,54 | | 3,42 | | Rp33.294.959.469 | |
| | Persentase peningkatan retribusi daerah | % | Rp5.346.6 96.788 | Rp5.081.7 44.580 | 3,21 | 1.200.000.000 | 3,11 | 1.200.000.000 | 3,02 | 1.300.000.000 | 2,93 | 1.300.000.000 | 2,84 | 1.300.000.000 | Rp5.897.366.051 | 6.300.000.000 |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 3.100.000.000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase kerja sama yang diimplementasi | % | 10 | 25 | 28,33 | 50.000.000 | 31,67 | 50.000.000 | 35 | 50.000.000 | 38,33 | 50.000.000 | 43,33 | 50.000.000 | 43,33 | 250.000.000 |

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

4.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1.1 Strategi Pembangunan Industri

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam pembangunan industri daerah perencanaan (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam menyusun langkah langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi dijabarkan dengan memperhatikan analisis Strengths Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dan isu isu strategis. Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT yang diperoleh dari pendapat stakeholders, sehingga merefleksikan pendapat kolektif suatu kelompok. Focus groups merupakan metode yang banyak dipakai untuk mengumpulkan pendapat dari stakeholders terkait (Leigh, 2010).

Strategi dan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat dirumuskan berdasarkan hasil FGD, yakni FGD pertama Tim Peneliti dan stake holder pada 3 November 2022 di Ruang OR Setda Bangka Barat dan FGD kedua pada 14 Desember 2022 di R Rapat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.



Analisis SWOT merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta merumuskan kegiatan di masa depan berdasarkan faktor-faktor tersebut (Leigh, 2010). Kondisi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan Sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang berasal dari luar. Pemetaan data analisis SWOT melalui kegiatan FGD sebagai berikut.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <p>Adanya OPD yang menangani industri Adanya aturan perindustrian Memiliki BLK Adanya alokasi APBD untuk subsektor industri Memiliki masterplan minapolitan Memiliki KIPT dan KI Ketersediaan bahan baku melimpah, khususnya sector pertanian, perikanan, perkebunan dan bahan galian Telah dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perindustrian Kuantitas dan kualitas SDM yang cukup baik pada OPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebagai input tenaga kerja Ketersediaan lahan budidaya sawit untuk industri kelapa sawit</p> | <p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <p>Akses pasar masih terbatas Penggunaan teknologi dan mesin produksi masih rendah Jiwa kewirausahaan rendah Ketersediaan dana dari Lembaga keuangan formal maupun informal masih rendah System informasi belum optimal APBD rendah Penguasaan teknologi industri pengolahan turunan timah dan logam serta komoditas lain sangat rendah Infrastruktur yang belum memadai</p> |
| <p style="text-align: center;">Peluang</p> <p>Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah dengan kondisi geografis strategis Permintaan domestik terhadap komoditas unggulan (lada, perikanan dan ikutan timah) tinggi Kebijakan pemerintah provinsi dan pusat mendukung pengembangan industri Terdapat perusahaan timah yang memiliki high technology dan alat berat Dukungan Pelabuhan laut yang memadai Produk turunan logam, kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya sangat bervariasi Permintaan pasar industri meningkat terutama elektronik Dijadikan Kawasan ekonomi khusus (KEK) industri propinsi</p> | <p style="text-align: center;">Ancaman</p> <p>Cadangan bahan tambang menipis jika dieksploitasi Biaya produksi industry sejenis rendah dari negara pesaing seperti India, Vietnam dan China Kualitas produk olahan timah, logam, pasir kuarsa, kaolin dan CPO bersaing di pasar Kuala Lumpur Perdagangan pasir mengandung timah, kaolin, kuarsa dan CPO melalui Singapura Monopoli pasar olahan timah dan logam tanah jarang oleh perusahaan besar/swasta Isu kerusakan lingkungan mengganggu peluruhan kuarsa, kaolin dan radiasi bahan logam Pembukaan area hutan untuk perkebunan dan pembebasan lahan Kawasan industry Masih lemahnya daya saing industry nasional Belum kuatnya struktur industry nasional Belum optimalnya regulasi pemerintah Energi listrik belum bisa memenuhi kebutuhan industry Masih terkonsentrasinya pembangunan industri di P Jawa</p> |

Evaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 1 Analisa Kwadran SWOT Untuk Faktor Internal Industri di Kabupaten Bangka Barat

| No | Kekuatan | Skor | Kelemahan | Skor |
|----|--|------|--|------|
| 1. | Adanya OPD yang menangani industri | 3,00 | Akses pasar masih terbatas | 4,00 |
| 2. | Adanya Peraturan yang mengatur masalah perindustrian | 3,00 | Penggunaan teknologi dan mesin-mesin produksi masih rendah | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|---|--------------|
| 3. | Memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) | 3,00 | Jiwa kewirausahaan rendah | 3,00 |
| 4. | Adanya alokasi APBD untuk subsector Industri | 3,00 | Ketersediaan dana dari lembaga keuangan formal maupun informal masih rendah | 4,00 |
| 5. | Memiliki masterplan minapolitan | 3,00 | Sistem informasi belum optimal | 4,00 |
| 6. | Memiliki KIPT dan KI | 4,00 | APBD masih rendah | 3,00 |
| 7. | Ketersediaan bahan baku melimpah, khususnya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan bahan galian | 4,00 | Penguasaan teknologi industri pengolahan turunan timah dan logam serta komoditas lain sangat rendah | 3,00 |
| 8. | Telah dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perindustrian | 3,00 | Infrastruktur yang belum memadai | 3,00 |
| 9. | Kuantitas dan kualitas SDM yang cukup baik pada OPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | 3,00 | Penggunaan teknologi, serta kuantitas dan kualitas SDM perlu ditingkatkan | 3,00 |
| 10. | Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebagai input tenaga kerja | 3,00 | Peluang tenaga kerja baru untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM | 3,00 |
| 11. | Ketersediaan lahan budidaya sawit untuk industri kelapa sawit | 4,00 | Infrastruktur produksi belum memadai | 3,00 |
| 12. | Memiliki komoditas unggulan perikanan darat dan laut | 4,00 | Penguasaan teknologi industri pengolahan masih rendah | 3,00 |
| | Jumlah Skor | 40,00 | | 40,00 |

Tabel 4. 2 Analisa Kwadran SWOT Untuk Faktor Eksternal Industri di Kabupaten Bangka Barat

| No | Peluang | Skor | Ancaman | Skor |
|----|--|------|---|------|
| 1. | Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah dengan geografis strategis (WPS) | 4,00 | Cadangan bahan tambang menipis jika diesploitasi | 4,00 |
| 2. | Permintaan domestik terhadap komoditas unggulan (lada dan perikanan serta ikutan timah) tinggi | 4,00 | Biaya produksi industri sejenis rendah dari negara pesaing baru seperti India, Vietnam, dan China | 4,00 |
| 3. | Kebijakan pemerintah Provinsi dan Pusat mendukung pengembangan industri | 4,00 | Kualitas produk olahan timah, logam, pasir kuarsa, kaolin, dan CPO bersaing di pasar Kuala Lumpur | 4,00 |
| 4. | Terdapat perusahaan Timah Tbk yang memiliki high technology dan alat-alat berat | 3,00 | Perdagangan pasir mengandung timah, kaolin, kuarsa dan CPO melalui Singapura | 3,00 |
| 5. | Dukungan pelabuhan laut yang memadai | 4,00 | Monopoli pasar olahan timah dan logam tanah jarang oleh perusahaan besar/swasta | 3,00 |
| 6. | Produk turunan logam, kelapa sawit dan komoditas unggulan lainnya sangat bervariasi | 4,00 | Isu kerusakan lingkungan mengganggu peluruhan kuarsa, kaolin, dan radiasi bahan logam | 4,00 |

| | | | | |
|----|--|--------------|---|--------------|
| 7. | Permintaan pasar industri meningkat terutama elektronik | 3,00 | Pembukaan area hutan untuk perkebunan dan pembebasan lahan Kawasan industri | 4,00 |
| 8. | Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Provinsi | 4,00 | Kualitas dan kuantitas SDM dalam mengelola KEK Industri Provinsi | 4,00 |
| | Jumlah Skor | 30,00 | | 30,00 |

Setelah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan tahap pencocokan yang relatif sulit dan kritis dalam merumuskan strategi. Tujuan tahapan pencocokan adalah untuk merumuskan alternatif strategi yang layak, bukan untuk memiliki strategi terbaik. Salah satu alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matriks SWOT. Matriks ini membantu mengembangkan empat tipe strategi yaitu: S-O (strengths-opportunities), W-O (weaknesses-opportunities), S-T (strengths-threats), dan W-T (weaknesses-threats). Matriks ini menggambarkan peluang dan eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dari hasil pengolahan analisa SWOT untuk Kabupaten Bangka Barat strategi yang diambil adalah bagaimana menggunakan segala kekuatan untuk meraih peluang dan kekuatan yang dimiliki juga dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa program.

Strategi pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kondisi internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan komoditas unggulan,
2. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan,
3. Pengembangan industri kecil menengah (IKM) berbasis komoditi unggulan,
4. Mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah dan berwawasan lingkungan,
5. Perluasan akses pasar,
6. Peningkatan dukungan finansial,
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas,
8. Peningkatan sarana dan prasarana bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia,
9. Peningkatan infrastruktur dan akses ke bahan baku dan kawasan industri.

4.1.2 Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pengambil pembangunan industri kebijakan di daerah terkait mencapai tujuan dan sasaran RPIK Bangka Barat Tahun 2023 - 2043 yang sudah dirumuskan dalam Bab 3 dengan efektif dan efisien. Pembangunan industri daerah

khususnya daerah Kabupaten Bangka Barat tidak lepas dari arah dan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi dan industri sebagai faktor penggerak pengembangan wilayah seperti termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Arah kebijakan industri dengan merujuk pada Undang Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014 terkait Strategi pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat ditampilkan dalam Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunann Industri Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 – 2043

| No | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---|--|
| 1. | Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikular, perkebunan, dan produksi peternakan) dan perikanan | Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimal sektor unggulan daerah melalui peningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah |
| | Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi | |
| | Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian | |
| | Pengembangan Kawasan industri pengolahan berbasis potensi daerah | |
| | Peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan, serta literasi digital usaha mikro | |
| | Penguatan kelembagaan dan peran koperasi | |
| | Meningkarkan promosi pariwisata yang inovatif berbasis teknologi informasi melalui pendekatan penta helix | |
| | Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | |
| | Meningkatkan pelestarian kekayaan sejarah, adat istiadat, seni, dan budaya lokal | |
| | Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) | |
| | Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan, distribusi perdagangan serta pengembangan potensi pasar | |
| | Meningkatkan perlindungan konsumen | |
| 2. | Penguatan ketersediaan data yang berkualitas serta penyusunan regulasi investasi | Iklim dan layanan investasi |
| | Untuk fasilitas kemudahan usaha dan investasi | |
| | Peningkatan iklim investasi daerah | |
| | Peningkatan kualiatas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangan | |
| 3. | Meningkatkan ketersediaan jaringan dan perlengkapan jalan | Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastuktur yang berkualitas dalam |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>Percepatan penatagunaan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung dan negara</p> | <p>rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi</p> |
| 4. | <p>Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan</p> <p>Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah</p> | <p>Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah</p> |
| 5. | <p>Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan perlindungan sosial</p> <p>Mengembangkan dan meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan miskin</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan kelurahan</p> <p>Peningkatan akses dan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau</p> <p>Menyediakan akses perumahan dan pemukiman yang layak, serta meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perumahan</p> | <p>Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitas harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan</p> |
| | <p>Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan, dan kemitraan</p> <p>Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial</p> | |
| 6. | <p>Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya Pendidikan</p> <p>Memperluas implementasi sistem penjaminan mutu</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah</p> <p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat</p> <p>Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan</p> <p>Meningkatkan kapasitas pola hidup bersih dan sehat masyarakat</p> <p>Meningkatkan kapasitas daya saing olahraga</p> <p>Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera</p> | <p>Meningkatkan jaminan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen, manajemen bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> |
| 7. | <p>Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pembinaan, keluarga, keikutsertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan</p> <p>Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, hak</p> | <p>Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak</p> <p>Meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial)</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup</p> <p>Meningkatkan masyarakat sadar hukum</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemajemukan (kebhinekaan)</p> | |
| 8. | <p>Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan daerah</p> <p>Penguatan penerapan kebijakan satu data</p> <p>Menguatkan pengawasan tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah</p> <p>Menguatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah</p> <p>Peningkatan implementasi pengamanan informasi</p> <p>Optimalisasi penerapan SPBE</p> <p>Meningkatkan tertib kearsipan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah</p> <p>Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Menguatkan implementasi manajemen ASN</p> | Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintah yang efektif dan efisien |
| 9. | <p>Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah</p> <p>Meningkatkan peran BUMD Dan BUMDes</p> | Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah |

4.2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

A. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 terdapat 10 sektor industri yang menjadi prioritas pembangunan nasional selama dua puluh tahun yang akan datang. Sepuluh sektor prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik & Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka:

4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Bangka Barat dilakukan melalui beberapa tahap analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long list komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan komoditi unggulan. Pemilihan komoditi unggulan dilakukan menggunakan sejumlah kriteria yang diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kriteria tersebut terdiri atas :

1. Penyerapan tenaga kerja

Produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat,

2. Sumbangan terhadap perekonomian

Produk tersebut memiliki nilai ekonomis yang memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

3. Sektor basis ekonomi daerah

Produk tersebut masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

4. Dapat diperbaharui

Produk tersebut bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

5. Unsur sosial budaya

Dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan dibutuhkan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

6. Ketersediaan pasar

Produk tersebut mampu terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.

7. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.

8. Modal

Ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

9. Sarana dan prasarana produksi

Ini menunjukkan kemudahan bagi pengusaha produk unggulan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.

10. Manajemen usaha

Kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.

11. Harga

Kriteria ini mencerminkan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha

Metode penentuan jenis industri unggulan kabupaten

1. Focus Group Discussion 1

Untuk mengetahui jenis-jenis industri unggulan kabupaten, maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang pertama, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Para stakeholder yang turut memberikan masukan adalah dari perwakilan Dinas kabupaten, perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Berdasarkan hasil FGD pertama tersebut, munculah usulan 6 (enam) industri unggulan kabupaten, sebagai berikut :

1. Industri pengolahan kelapa sawit,
2. Industri pengolahan karet,
3. Industri pengolahan lada,
4. Industri pengolahan hasil perikanan,
5. Industri pengolahan sumber daya mineral,
6. Industri pangan berbasis IKM.

Beberapa hal terkait dengan smelter di Bangka Barat dan kawasan penambangan didiskusikan secara mendalam. Adanya timah di Tanjung Niur menjadikan hasil laut menjadi berkurang. Hasil laut bisa dikembangkan dengan pengolahan ikan, kemplang dan lain sebagainya. Hanya saja belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Padahal TPI sangat penting fungsinya sebagai pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan/hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak. Industri rumahan sudah sangat maju di Bangka Barat tetapi tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Focus Group Discussion 2

Untuk mendalami potensi industri unggulan yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat maka dilakukan FGD 2. Pada FGD 2 dilakukan diskusi mendalam antara pemangku kepentingan daerah untuk menggali lebih jauh industri unggulan daerah. Peringkat kepentingan 12 Kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4 Peringkat Kepentingan 12 Kriteria

| Peringkat Kepentingan | Kriteria |
|------------------------------|--|
| 1 | Penyerapan tenaga kerja |
| 2 | Bahan baku |
| 3 | Ketersediaan pasar |
| 4 | Sumbangan terhadap perekonomian |
| 5 | Modal |
| 6 | Harga |
| 7 | Sarana dan prasarana produksi |
| 8 | Manajemen usaha |
| 9 | Dapat diperbaharui |
| 10 | Sektor basis ekonomi daerah |
| 11 | Unsur sosial budaya |
| 12 | Teknologi yang relevan, tepat guna, dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru |

Untuk produk andalan sesuai hasil diskusi dan analisa didapat tiga peringkat teratas prioritas komoditas industri olahan Kabupaten Bangka Barat yaitu Industri pengolahan hasil perikanan, mineral ikutan serta Industri pengolahan lada dan kelapa sawit.

Selain tiga industri terpilih diatas berdasarkan proses FGD dengan stakeholder di Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi kriteria produk unggulan sebagaimana tertera pada Permendagri, ditentukan pula industri potensial yang akan dikembangkan dalam dua puluh tahun mendatang di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kekhasan potensi yang ada di daerah. Yang dimaksud dengan industri potensial adalah industri yang masih membutuhkan penelaahan/penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan, namun memiliki prospek ekonomi yang bagus pada masa depan dan perlu dikelola peningkatan nilai tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bangka Barat menonjol dengan industri timah. Industri timah sendiri, sebagai industri yang sudah lama berkembang di Bangka Barat, dapat dikatakan sudah mapan, dan tidak memerlukan kebijakan dan program yang perkembangannya, spesifik untuk mendorong.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disebutkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera bagian Selatan. Dimana prioritas pembangan industri di wilayah ini adalah, 1) Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, 2) industri pangan, dan 3) industri hulu agro. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Propinsi (RIPIP), Kabupaten Bangka Barat direncanakan sebagai wilayah pengembangan industri unggulan dengan komoditas industri unggulan yaitu Pengolahan Ikan dan hasil laut, mineral ikutan serta pengolahan lada dan kelapa sawit.

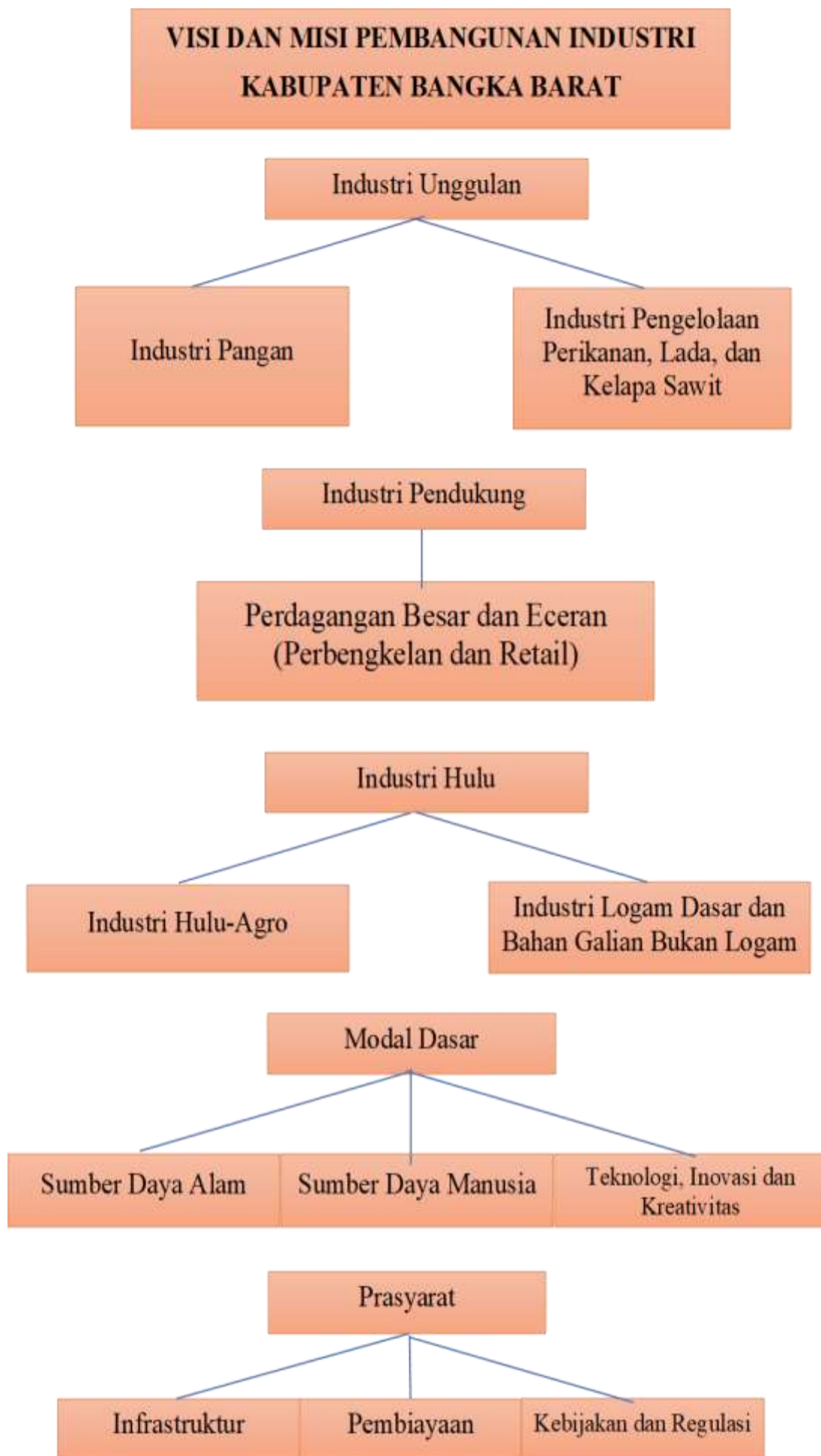
Industri yang perlu dikembangkan pada dua puluh tahun yang akan datang berkaitan dengan bahan galian bukan logam adalah pengembangan pengolahan mineral ikutan. Sebagai daerah penghasil timah, Kabupaten Bangka Barat memiliki cadangan mineral ikutan yang sangat besar dan diincar banyak negara asing. Pada umumnya, mineral ikutan tersebut berasosiasi dengan mineral lain atau sebagai mineral ikutan dalam mineral bijih atau konsentrat pada industri pertambangan bijih timah. Mineral-mineral ikutan dalam bijih timah mengandung unsur/logam bernilai ekonomi tinggi yang belum dimasukkan sebagai logam yang diperhitungkan dan dibuang sebagai tailing (bijih atau terak peleburan) atau ikut dalam konsentrat bijih.

Mineral ikutan yang teridentifikasi dari penambangan timah antara lain: *Ilmenit, Monazit, Xenotime, Zirkon, Rare earth elements*, dll. Timah solder tidak ada lagi karena kualitasnya masih di bawah. Oleh karena itu dalam RPIK ini, industri

pengolahan mineral ikutan tambang, dalam hal ini mineral ikutan timah merupakan industri yang potensial yang perlu diatur pengelolaannya agar lebih bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Sentra pengolahan makanan dan kerajinan terkait galeri UMKM yaitu di batu rakit, sentra industri hasil kelautan untuk ruang produksi, khususnya ikan dan hasil kelautan akan dibuat galeri. *Space* untuk melihat proses produksi menghadap ke laut di tahun 2023. Pembangunan pariwisata di batu rakit dan pasar wisata. Pantai batu rakit akan digunakan untuk mendukung para UMKM di Bangka Barat terkait destinasi pariwisata. Rencana pengembangan terkait pusat pelayanan usaha terpadu juga sudah jelas. Hal ini berkaitan dengan PLUT untuk pembinaan dan fasilitas, pasar pariwisata, pengesahan produk dan pemasaran produk.

Bagan industri daerah Kabupaten Bangka Barat dan Tahapan Pengembangan 3 Industri Unggulan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.5 dibawah ini.



**Gambar 4. 1 Bagan Industri Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2023 - 2043**

**Tabel 4. 5 Tahapan Pengembangan Industri Unggulan
Kabupaten Bangka Barat**

| NO | INDUSTRI UNGGULAN | JENIS INDUSTRI | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | 2023 – 2028 | 2028 – 2033 | 2033 – 2038 | 2038 – 2043 |
| 1 | Industri Pengelolaan dan Pengolahan hasil laut dan perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut seperti abon, getas, kerupuk, dll 2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya 3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya 4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya 5. Industri pengolahan limbah ikan 6. Cold storage Pabrik es kapasitas > 100 ton / hr | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut seperti abon, getas, kerupuk, dll 2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya 3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya 4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya 5. Industri pengolahan limbah ikan 6. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut seperti abon, getas, kerupuk, dll 2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya 3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya 4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya 5. Industri pengolahan limbah ikan 6. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya | <ol style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas dari komoditas kelautan, perikanan, budidaya dan produk olahan B. Mengembangkan sistem minat bisnis C. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan minapolitan D. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengolah ikan |
| 2 | Industri Pengelolaan dan Pengolahan Lada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lada hitam untuk bahan baku obat (mengontrol lemak dalam darah; memberi efek anti kanker; antioksidan; mengatasi masalah pencernaan, penyakit asma dan saluran pernapasan) 2. Balsem lada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minyak lada untuk flavor pada berbagai produk makanan, bahan obat, aroma terapi, dan beberapa jenis parfum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oleoresin sebagai bahan baku flavor; bahan pengawet alami; bahan baku obat dan farmasi, kosmetik, parfum, pengalengan daging, saos, minuman ringan, industri roti dan kembang gula | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oleoresin Tepung lada, 2. Lada hijau kering, 3. Lada hijau kering beku, 4. Lada hijau dalam larutan garam, 5. Ekstraksi minyak lada, 6. Balsam lada |
| 3 | Industri Pengelolaan dan Pengolahan Sawit | <i>INDUSTRI OLEOFOOD</i> | | | |
| | | Stearin, margarin, asam organik | <i>Specialty fats (coco butter, substitute shortening, margarin), Tocopherol, Betacarotene</i> | <i>Specialty fats</i> aktif / penolong pengolahan pangan | <i>Specialty fats</i> aktif / penolong pengolahan pangan |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | INDUSTRI OLEOKIMIA | | | |
| | | <i>Fatty acids</i> | <i>Fatty alcohols, Methyl ester sulfonate (biosurfactant)</i> | <i>Methyl esters, bioplastic (PHB, PHV, polylactate) berbasis limbah PKS dan serat nabati</i> | <i>Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyls esters, dan polymers turunan minyak sawit</i> |
| | | INDUSTRI BIOENERGI DAN KEMURGI | | | |
| | | Arang aktif, biogas limbah cair untuk listrik | <i>Biodiesel, bioethanol, bioethanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa</i> | <i>Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat / farmasi</i> | <i>Biovatur (bio jet fuel) Nanocellulose derivatives, biobased fiber & polymers (carbon fiber, viscous), new generation of biobasedcomposit</i> |
| 4 | Industri Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Mineral | Hilirisasi horizontal terdiri dari: 1. <i>Zircon</i> untuk industri berbasis <i>zircon</i> 2. <i>Monazite</i> (Ce, La, Nd, Th) PO4 sebagai bahan mentah mineral secara strategis di Industri bumi yang langka 3. <i>Ilmenite</i> untuk industri berbasis titanium | Peleburan terdiri dari: 1. <i>Tin Solder Bar Extrude</i> yaitu <i>Billes Casting, Extruding, dan Cutting&Marking</i> 2. <i>Tin Solder Bar Casting</i> yaitu <i>Casting, dan Weighing &Packaging</i> 3. <i>Tin Solder Wire</i> yaitu <i>Billet Casing, Extruding, Rolling +/Drawing, dan Winding.</i> | Hilirisasi vertikal terdiri dari: 1. <i>Bankastannic</i> yaitu <i>Stannic Chloride, dan Dimethyltin Dichloride.</i> 2. <i>Bankastab</i> yaitu <i>Methyltin Stabilizer, dan Tin One Pack.</i> 3. <i>Bankaesa</i> yaitu <i>Bar Casting, Bar Extrude, Ball and Half Ball, dan Solid Wire.</i> | Industri dan Ekspor-Impor timah terdiri dari: 1. <i>Tin Foil</i> 2. <i>Tin Pipe</i> 3. <i>Tin Tube</i> 4. <i>Tin Chemical</i> 5. <i>Tin Wire</i> 6. <i>Pewter</i> 7. <i>Pipe Fitting</i> 8. <i>Electronic Components</i> 9. <i>Automotive Components</i> 10. <i>Tin Plating Steel Sheet</i> 11. <i>Tin Coating Plastic Sheet</i> A. Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices” B. Meningkatkan pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices” C. Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan bantuan D. Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi E. Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung F. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan G. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS H. Meningkatnya pendapatan daerah sektor lain yang sah |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | I. Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP J. Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi |
|--|--|--|--|--|---|

B. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten

Sasaran dan program-program dari masing- masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

A. Industri Pengelolaan dan Pengolahan Ikan

Sasaran dan program industri pengolahan hasil perikanan pada tahun 2023-2043 pada RPIK Kabupaten Bangka Barat disusun berdasarkan potensi hasil perikanan, khususnya yang berasal dari hasil penangkapan laut. Industri pengolahan hasil perikanan memiliki potensi besar dalam perindustrian Kabupaten Bangka Barat. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bangka Barat yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan, selat dan teluk. Di Kabupaten Bangka Barat juga akan ditetapkan suatu kawasan minapolitan yang tentunya akan sangat mendukung perkembangan industri perikanan ini.

Rancangan sasaran dan program industri pengolahan hasil perikanan disusun berdasarkan kondisi saat ini dari ketersediaan pasokan ikan, khususnya perikanan tangkap laut, nilai produksi, jumlah unit pengolahan ikan, tenaga kerja, ekspor, dan investasi. Masing-masing kondisi saat ini (*existing conditions*) dibahas pada bagian berikut.

Tabel 4. 6 Nilai Produksi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (ton)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Perikanan Tangkap | 239.730 | 449.027 | 547.662 | 591.662 | 632.902 |
| 2. | Budidaya Air Tawar | 597 | 635 | 1.697 | 2.290 | 2.747,87 |
| 3. | Budidaya Air Laut | 6.548 | 1.990 | 2.314 | 8.559 | 30.543 |

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan nilai yang sangat fluktuatif dari tahun 2016-2020. Total produksi perikanan tangkap tahun 2016 - 2020 mencapai 2.461.172,54 ton. Total budidaya air tawar mengalami peningkatan dari tahun 2016 597 ton mencapai 2.747.87 ton di tahun 2020, dan total budidaya air laut naik dari 6.548 ton tahun 2016 mencapai 30.543 ton pada 2020.

Produksi perikanan tangkap, budidaya air tawar dan laut menurut Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016-2020 disajikan secara rinci pada Tabel 4.6 berikut ini.

Produksi perikanan tangkap tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4. 7 Total Nilai Produksi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (ton)

| Tahun | Perikanan Tangkap | Budidaya Air Tawar | Budidaya Air Laut |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2016 | 239.730,42 | 597 | 6.548 |
| 2017 | 449.026,80 | 635 | 1.990 |
| 2018 | 547.851,08 | 1.697 | 2.314 |
| 2019 | 591.662,00 | 2.290 | 8.559 |
| 2020 | 632.902,24 | 2.747,87 | 30.543 |
| Jumlah Total | 2.461.172,54 | 7.966,87 | 49.954 |

Volume dan nilai produksi olahan hasil perikanan menurut jenis kegiatan pengolahan di Kabupaten Bangka Barat rata-rata mengalami kenaikan 46,61% dari tahun 2016 – 2017 untuk perikanan tangkap dan kenaikan budidaya air tawar sebesar 62,58% dari tahun 2017 – 2018 , sedangkan budidaya air laut mengalami peningkatan signifikan tahun 2019 sebesar 72,96% melonjak naik di tahun 2018 – 2019. Volume produksi olahan hasil perikanan tangkap tahun 2016-2020 total hasil perikanan tangkap sebesar 2.461.172,54 ton, budidaya air tawar sebesar 7.966,87, dan budidaya air laut sebesar 49.954. Volume dan nilai produksi olahan hasil perikanan menurut jenis kegiatan pengolahan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 – 2020 disajikan secara rinci pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 8 Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat

| No | KECAMATAN | Produksi Tahun 2016 (kg) | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Bawal | Nila | Lele Dumbo | Patin | Mas | Kerapu | Kerang Darah | | Jumlah |
| 1 | Tempilang | 929 | 461 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 |
| 2 | Kelapa | 150 | 85 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 |
| 3 | Jebus | 0 | 1.425 | 2.820 | 195 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 5.540 |
| 4 | Mentok | 0 | 0 | 7.350 | 5.624 | 0 | 0 | 260.000 | 360.000 | 632.974 |
| 5 | Parittiga | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 84.500 | 153.000 | 238.000 |
| 6 | Sp. Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 1.079 | 1.971 | 15.431 | 5.819 | 1.100 | 400 | 344.500 | 513.000 | 883.300 |
| JUMLAH TOTAL | | 883.300 kg/ 883,3 Ton | | | | | | | | |

Table 4.8 menjelaskan produksi budidaya perikanan tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat di kecamatan tempilang, kelapa, jebus, mentok, parittiga dan simpang teritip. Produksi budidaya perikanan terdiri dari bawal, nila, lele dumbo, patin, mas, kerapu, dan kerang darah. Jumlah yang terbanyak adalah kerang darah sebesar 355.500 kg dan 513.000 kg, lele dumbo sebesar 15.431 kg dan patin sebesar 5.819 kg. Produksi yang terendah adalah kerapu sebesar 400 kg. Jumlah total produksi budidaya perikanan yaitu 883.300 kg / 883,3 ton.

Tabel 4. 9 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Bangka Barat

| No | Jenis Ikan | Produksi [Ton] | Satuan [Rp] x 1.000 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Ikan Pelagis Kecil | | |
| 1 | Teri | 1.397,0 | 6.498.750 |
| 2 | Teri Nasi | 507,9 | 5.175.128 |
| 3 | Belanak | 712,5 | 10.819.773 |
| 4 | Julung-julung | 67,2 | 1.249.471 |
| 5 | Banyar | 44,3 | 678.760 |
| 6 | Kembung | 789,0 | 14.523.409 |
| 7 | Selar Kuning | 200,0 | 2.204.000 |
| 8 | Tembang | 723,4 | 9.290.478 |
| 9 | Selangat | 11,5 | 400.000 |
| 10 | Tetengkek | 125,6 | 2.298.000 |
| 11 | Ikan Pelangis Kecil Lainnya | 673,1 | 6.731.000 |
| | Sub Total | 5.251,5 | 59.868.769 |
| | Ikan Pelagis Besar | | |
| 1 | Tongkol Komo | 126,5 | 3.961.000 |
| 2 | Tenggiri | 618,3 | 18.909.000 |
| 3 | Cucut Macam | 0,4 | 4.000 |

| | | | |
|----|--------------------------|----------------|-------------------|
| | Sub Total | 745,2 | 22.874.000 |
| | Ikan Demersal | | |
| 1 | Mayung | 218,6 | 3.073.904 |
| 2 | Ikan Sebelah | 77,5 | 1.550.000 |
| 3 | Bawal Hitam | 230,2 | 12.020.406 |
| 4 | Bawal Putih | 124,9 | 5.364.678 |
| 5 | Peperek | 10,2 | 183.600 |
| 6 | Lencam | 0,7 | 13.000 |
| 7 | Kakap Putih | 32,8 | 2.044.000 |
| 8 | Kakap Merah/Bambangan | 200,6 | 7.970.000 |
| 9 | Jenaha | 7,4 | 114.382 |
| 10 | Kurisi | 442,2 | 9.397.212 |
| 11 | Biji Nangka | 0,7 | 14.000 |
| 12 | Kuro/ Senangin | 115,5 | 2.887.500 |
| 13 | Gulamah/Tiga Wajah | 656,3 | 12.247.200 |
| 14 | Alu-alu/Manggilala/Pucul | 185,7 | 2.914.500 |
| 15 | Pari Lainnya | 6,5 | 175.000 |
| 16 | Ikan Demersial lainnya | 378,1 | 4.372.716 |
| | SUB TOTAL | 2.839,0 | 68.676.599 |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
| | Ikan Karang | | |
| 1 | Ekor Kuning /Pisang-pisang | 161,8 | 3.948.500 |
| 2 | Kerapu Karang | 54,0 | 1.182.500 |
| 3 | Kerapu Sunu | 42,9 | 1.375.000 |
| 4 | Beronang Lingkis | 10,3 | 206.000 |
| 5 | Ikan Beronang | 30,1 | 651.000 |
| 6 | Ikan Karang Lainnya | 72,6 | 1.452.000 |
| | SUB TOTAL | 371,7 | 8.815.000 |
| | Binatang berkulit keras | | |
| 1 | Udang Putih/Jerbung | 700,4 | 30.384.695 |
| 2 | Udang lainnya | 820,9 | 5.722.614 |
| 3 | Kepiting | 436,2 | 19.953.646 |
| 4 | Rajungan | 282,6 | 9.241.696 |
| | SUB TOTAL | 2.240,1 | 65.302.650 |

Tabel 4.9 menjelaskan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis ikan di Kabupaten Bangka Barat dengan kriteria ikan pelagis kecil dengan hasil produksi terbesar sebanyak 5.251,5 ton dengan nilai Rp. 59.868.769; dan binatang berkulit keras (udang putih/jerbung, udang lainnya, kepiting, rajungan) dengan hasil produksi ke dua terbesar sebanyak 2.2401,1 ton dengan nilai Rp. 65.302.650.

Tabel 4. 10 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Binatang Lunak di Kabupaten Bangka Barat

| No | Jenis Ikan | Produksi [ton] | Satuan [RP] x 1.000 |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| | Binatang Lunak | | |
| 1 | Kerang Darah | 694,5 | 1.620.600 |
| 2 | Cumi cumi | 69,9 | 2.049.655 |
| | SUB TOTAL | 764,4 | 3.670.255 |
| | | | |
| | Binatang Air Lainnya | | |
| 1 | Lainnya | 761,6 | 10.523.150 |
| | SUB TOTAL | 761,6 | 10.523.150 |
| | TOTAL | 12.973,5 | 293.730.423 |

Table 4.10 menjelaskan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis binatang lunak di Kabupaten Bangka Barat dengan kriteria yang terbesar kerang darah dengan hasil produksi sebanyak 694,5 ton dengan nilai Rp. 1.620.600, yang kedua ada cumi-cumi dengan produksi 69.9 ton dengan nilai Rp. 2.049.655. Binatang air lainnya dengan produksi 761,6 ton dengan nilai 10.523.150. Total keseluruhan dengan produksi 12.973,5 ton dengan nilai Rp. 293.730.423.

Industri pengolahan ikan dirancang berdasarkan cakupan industri ikan berdasarkan 6 (enam) kelompok seperti tersaji pada Tabel 4.11 berikut ini.

***Tabel 4. 11 Kelompok Industri Pengolahan Ikan
Diklasifikasikan Berdasarkan Klasifikasi Kelompok
Pengusaha Indonesia (KLUI)***

| KLUI 5 digit | Uraian |
|---------------------|--|
| 31141 | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya |
| 31142 | Industri penggaraman atau pengeringan ikan dan biota perairan lainnya seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenisnya |
| 31143 | Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya seperti ikan bandeng asap, ikan cakalang asap, dan sejenisnya |
| 31144 | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya |
| 31145 | Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya seperti pindang ikan bandeng, pindang ikan tongkol, dan sejenisnya |
| 31149 | Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota lainnya : tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis, dan sejenisnya |

Table 4.11 menjelaskan kelompok industri pengolahan ikan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi kelompok pengusaha indonesia (KLUI). Hasil perikanan direncanakan berdasarkan pohon industri pengolahan hasil laut yang disusun oleh Kementrian Perindustrian. Jenis jenis industri pengolahan hasil perikanan selama periode tahun 2023-2043 disusun berdasarkan kondisi saat ini dan industri yang diperlukan dengan mengacu pada pohon industri. Jenis industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bangka Barat tersaji. Nilai produksi budidaya perikanan air tawar dan air laut dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 berikut ini.

Tabel 4. 12 Nilai produksi Budidaya perikanan Air tawar Kabupaten Bangka Barat tahun 2016

| No | Kecamatan | Nilai Produksi | | | | |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Bawal | Nila | Lele Dumbo | Patin | Mas |
| | | Harga ikan/kg | | | | |
| | | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1 | Tempilang | 27.870.000 | 11.525.000 | 71.720.000 | 0 | 0 |
| 2 | Kelapa | 4.500.000 | 2.125.000 | 31.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | Mentok | 0 | 35.625.000 | 56.400.000 | 5.850.000 | 33.000.000 |
| 4 | Jebus | 0 | 0 | 147.000.000 | 168.720.000 | 0 |
| 5 | Parittiga | 0 | 114 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 6 | Sp. Teritip | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 31.370.000 | 49.275.000 | 308.620.000 | 174.570.000 | 33.000.000 |
| | Total Jumlah | 597.835.000 | | | | |

Table 4.12 menjelaskan nilai produksi perikanan air tawar kabupaten Bangka Barat tahun 2016 pada Kecamatan Tempilang, Kelapa, Mentok, Jebus, Parit tiga, Sp. Teritip. Produksi perikanan terdiri dari bawal, nila, lele dumbo, patin dan mas. Peminat produksi tertinggi pada Kecamatan Mentok dengan ikan nila, lele dumbo, patin dan mas. Peminat produksi terendah pada kecamatan Simpang Teritip.

Tabel 4. 13 Produksi Budidaya Perikanan Air laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016

| No | Kecamatan | Nilai Produksi (Rp) | | | | Jumlah |
|----|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Kerapu | Bandeng | Kerang merah | Cumi-cumi | |
| | | Harga ikan/kg | | | | |
| | | <i>100.000</i> | <i>20.000</i> | <i>4.000</i> | <i>10.000</i> | <i>Jumlah</i> |
| 1. | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Mentok | 0 | 0 | 1.040.000.000 | 3.600.000.000 | 4.640.000.000 |
| 5. | Parittiga | 40.000.000 | 0 | 338.000.000 | 1.530.000.000 | 1.908.000.000 |
| 6. | Sp. Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 40.000.000 | 0 | 1.387.000.000 | 5.130.000.000 | |
| | Total Jumlah | 6.548.000.000 | | | | |

Table 4.13 menjelaskan Produksi Budidaya perikanan air laut Kabupaten Bangka Barat 2016. Peminat ikan tertinggi terdapat pada kecamatan Parittiga dengan Konsumsi Kerapu, kerang merah, dan cumi-cumi. Peminat konsumsi perikanan terendah pada Tempilang, Kelapa, Jebus, dan Simpang Teritip.

Tabel 4. 14 Jenis industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043

| No | 2023 - 2028 | 2028 – 2033 | 2033 - 2038 | 2038 - 2043 |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi | Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi | Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi | Industri pangan olahan dan hasil laut: Minyak ikan,ikan beku,ikan kaleng,ikan asap, ikan pindang, dendeng,ikan asin,terasi,abon,fillet, tepung ikan, gelatin,kerajinan tulang, kerupuk,alas kaki, aksesoris. |
| 2. | Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya |
| 3. | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya |
| 4. | Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya |
| 5. | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya |
| 6. | | Industri minyak ikan | Industri minyak ikan | Industri minyak ikan |
| 7. | | | Industri pengolahan limbah ikan | Industri pengolahan limbah ikan |
| 8. | | | | Industri pengolahan dengan system pengemasan yang baik |

Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bangka Barat perlu bersinergi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Sasaran pembangunan industri pengolahan hasil ikan tersaji pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4. 15 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Ikan Tahun 2023– 2043 Kabupaten Bangka Barat

| No | Sasaran | Tahun | | | |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1. | Nilai tambah (Rp Milyar) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 2. | Pertumbuhan (%) | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 3. | Nilai ekspor (juta rupiah) | 4.500.000 | 4.750.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 4. | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 25 ribu | 26 ribu | 27 ribu | 28 ribu |
| 5. | Nilai investasi (Rp Milyar) | 200 | 300 | 400 | 500 |

Program pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan yang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 – 2043 dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4. 16 Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2023- 2043

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | | |
|-----------|--|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-lain | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| I. | Program Pengembangan SDM Hasil Laut dan Perikanan | | | | | | | |
| A. | Peningkatan kemampuan SDM Perikanan | | | | | | | |
| 1. | Training/Diklat intensifikasi hasil laut dan perikanan | DKP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Workshop/Short course standar pasca panen | DKP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Peningkatan kemampuan SDM Industri Hasil Laut dan Perikanan | | | | | | | |
| 1. | Workshop/Short course Quality Control (QC), pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri | DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pendidikan industri hasil laut dan perikanan bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri hasil laut dan perikanan | DKUP | Pelaku usaha hasil laut dan perikanan Perguruan Tinggi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/diploma jurusan khusus pengolahan hasil laut dan perikanan | DKUP, Disdikpora | Perguruan Tinggi | | ✓ | | | |

| II. Program Peningkatan Kapasitas Produksi dan Nilai Tambah | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------------|--|---|---|---|----|
| A. Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku hasil laut dan perikanan dengan dukungan untuk peningkatan produktivitas dan ekstensi yang berwawasan lingkungan | | | | | | | | |
| 1. | Intensifikasi, rejuvenasi, dan ekstensi budidaya perikanan (Sosialisasi intensif, penyuluhan, dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) | DKP | Pelaku usaha perikanan | SMK, SMTI, POLNEP /Perguruan Tinggi | ✓ | | ✓ | |
| 2. | Fasilitasi, benih yang berkualitas | DKP | Pelaku usaha perikanan | | | | | |
| 3. | Peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang berdaya saing | DKP, DKUP | Pelaku usaha perikanan | Perbankan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM Potensial) | DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | | | ✓ |
| 5. | Fasilitasi sistem rantai dingin ikan | DKUP | | | ✓ | | | |
| B. Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri | | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen | DKP | Pelaku usaha perikanan | SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen | DKP, DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| 3. | Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan) | DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4. | Kerja sama riset dan pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa) | DKUP | Pelaku usaha perikanan | Balitbangda, Baristand, Perguruan Tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| III. Program Pengembangan Pasar | | | | | | | | |
| 1. | Perluasan akses pasar | DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Membangun merek industri pengolahan ikan | DKP, DKUP | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 3. | Promosi hasil pengolahan ikan secara online dan offline | DKUP, DKP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IV. Programm Penyediaan Sumber Pembiayaan | | | | | | | | |
| 1. | Fasilitasi, Promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri pengolahan hasil laut dan perikanan) | BPMPSTP, DKUP | Pelaku usaha perikanan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| 2. | Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan Lembaga financial atau bank | DKUP | Pelaku usaha perikanan | Perbankan, Lembaga non bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Bimbingan dan pengawasan manajemen finansial | DKUP | IKM | Perbankan, Lembaga non bank | ✓ | | | ✓ |
| V. | Program-program Dukungan Lainnya / Insentif untuk Pengembangan Hasil Laut dan Perikanan | | | | | | | |
| A. | Program pembangunan infrastruktur/pengolahan lingkungan | BP4D, DPUPR, DISPERKIM HUB, DKP, DLH, PLN, PDAM, dll | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B. | Program peningkatan kerja sama (antar institusi pemerintah terkait; kerja sama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan hasil laut dan perikanan) | BP4D, DKUP | | Donor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C. | Program pengembangan perwilayahan industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI | BP4D, PUPR, DKUP | Industri (Investor) | | ✓ | | | ✓ |
| D. | Program pengembangan Kawasan minapolitan | BP4D, PUPR, DKUP, DKP | Industri (Investor) | | ✓ | | | ✓ |

B. Industri Pengolahan Lada

Pada tahun 2021 lada masih menjadi komoditas unggulan Kabupaten Bangka Barat untuk kelompok perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari luas panen dan produksi lada yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat seperti terlihat pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18 berikut ini.

Tabel 4. 17 Luas Lahan, Produksi, Produktivitas Lada dan KK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

| No | Kecamatan | Luas Area (Ha) | | | | Produksi | Produktifitas (Ton/Ha) | KK |
|----|-------------|----------------|---------|--------|---------|----------|------------------------|------|
| | | TBM | TM | TT/TR | Jumlah | | | |
| 1. | Kelapa | 362,28 | 548,44 | 48,75 | 959,47 | 435,41 | 0,79 | 2517 |
| 2. | Tempilang | 160,22 | 531,68 | 87,21 | 779,11 | 388,38 | 0,73 | 824 |
| 3. | Mentok | 55,93 | 223,44 | 60,16 | 339,53 | 197,21 | 0,88 | 314 |
| 4. | Sp. Teritip | 659 | 1826 | 222,28 | 2707,28 | 1531,88 | 0,84 | 2891 |
| 5. | Jebus | 418,85 | 507,15 | 51,15 | 977,15 | 368,98 | 0,73 | 1628 |
| 6. | Parit Tiga | 161,86 | 145,2 | 11,1 | 318,16 | 97,91 | 0,67 | 1091 |
| | Jumlah | 1818,14 | 3781,91 | 480,65 | 6080,70 | 3019,77 | 0,80 | 9051 |

Keterangan

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan; TM : Tanaman Menghasilkan; TT/TR: Tanaman Tua / Tanaman Rusak; KK: Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 4. 18 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Lada di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Produksi (Ton) |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Mentok | 322,94 | 330,96 |
| 2. | Simpang Teritip | 2.506,50 | 2.500,50 |
| 3. | Jebus | 793,81 | 466,34 |
| 4. | Kelapa | 793,81 | 466,34 |
| 5. | Tempilang | 978,33 | 801,60 |
| 6. | Parittiga | 273,50 | 143,27 |
| | Jumlah | | |
| | 2016 | 5.639,33 | 4.724,17 |
| | 2015 | 5.404,48 | 4.412,71 |

Tabel 4. 19 Hasil Produksi Setiap Tahun di Kabupaten Bangka Barat 2021

| No | Perkebunan | Tahun/Ton | | | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Lada | 4.724,17 | 4.905,94 | 5.586,09 | 3.654,18 | 3.456,92 |
| 2. | Karet | 14.636,27 | 13.621,54 | 17.572,63 | 11.185,06 | 12.053,93 |

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa hasil produk setiap tahun di Kabupaten Bangka Barat 2021 pada lada produksi terbesar pada 2018 sebesar 5.586,09 ton dan produksi terendah pada tahun 2020 sebesar 3.456,92 ton. Sedangkan Produksi karet terbesar pada tahun 2018 sebesar 17.572,6 ton dan terkecil pada tahun 2019 11.185,06 ton.

Luas areal dan produksi lada di Kabupaten Bangka Barat menempati jumlah tertinggi kedua di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya terlihat dari BPS Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 untuk produksi tahun 2001-2015.

Pada umumnya, petani tersebut langsung mengeringkan dengan cara menjemur lada yang dipanennya yang akan menghasilkan lada hitam. Atau melakukan perendaman dan pembersihan sebelum pengeringan, yang akan menghasilkan lada putih. Kurang lebih sebanyak 85% dari total produksi lada Indonesia diekspor ke luar negeri (Badan Diklat Prov. Kep. Babel, 2016). Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, pada tahun 2017 terdapat 9 perusahaan eksportir lada yang mengeksport lada ke Singapura, Jerman, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Spanyol, Jepang,

Belanda, India, dan Perancis, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 43.260.983 pada tahun 2015 dan US\$ 36.311.580 pada tahun 2016. Terdapat 3 jenis hasil pengolahan lada, yaitu lada hitam, putih, dan hijau. Dari ketiga jenis tersebut, pengolahan ladayang dikenal luas adalah lada hitam dan lada putih. Untuk hasil olahan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan sebutan Mentok White Pepper. Mentok merupakan ibukota Kabupaten Bangka Barat.

Belum ada data yang menunjukkan berapa jumlah perusahaan yang mengolah lada di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini terjadi karena pada umumnya petani langsung mengolah buah lada tersebut menjadi lada hitam atau lada putih. Padahal luas areal dan jumlah produksi lada di Kabupaten Bangka Barat yang terbesar kedua di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan luas areal dan jumlah produksi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbesar di Indonesia.

Hal itu dapat menjadi keunggulan Kabupaten Bangka Barat, dan dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi apabila lada tersebut diolah lebih lanjut menjadi produk yang lebih bernilai jual. Rantai pemasaran yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 60% adalah dari petani ke pedagang desa, dari pedagang desa ke pedagang kabupaten, dari pedagang kabupaten ke pedagang provinsi atau eksportir (Kemala, 2006). Oleh karena itu, pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat yang berbasis komoditas lada dapat diarahkan pada jenis industri:

1. Tepung lada,
2. Lada hijau kering,
3. Lada hijau kering beku,
4. Lada hijau dalam larutan garam,
5. Ekstraksi minyak lada,
6. Oleoresin,
7. Balsam lada.

Sasaran pembangunan industri untuk produk-produk pengolahan lada tersebut untuk 20 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4. 20 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Lada Tahun 2023 - 2038

| No | Sasaran | Tahun | | | |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1. | Nilai tambah (Rp Milyar) | 702 | 2.816 | 3.661 | 3.752 |
| 2. | Pertumbuhan (%) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 3. | Nilai ekspor (juta US\$) | 61 | 220 | 285 | 292 |
| 4. | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 2.975 | 3.050 | 3.126 | 3.204 |

Berdasarkan data dari Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada 2015-2017 (diolah), pertumbuhan produksi lada pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,55% dan 1,43%. Dengan demikian diasumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan produksi lada adalah 1,5% per tahun. Jadi pertumbuhan produksi lada untuk setiap lima tahun adalah 7,5%.

Selama ini penjualan lada yang dilakukan oleh pedagang dari Kabupaten Bangka Barat masih sebatas pada produk lada putih dan lada hitam. Untuk meningkatkan nilai jual, lada tersebut dapat diolah menjadi beberapa produk turunan dari lada seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan memperhitungkan penjualan produk olahan lada ke dalam nilai ekspor, yaitu produk lada hijau pada tahun 2018-2023, ditambah produk dari ekstraksi minyak lada pada tahun 2023-2028, serta ditambah produk oleoresin dan balsam lada pada tahun 2028-2038, maka nilai ekspor produk pengolahan lada menjadi jauh lebih tinggi.

Produk olahan lada memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lada putih atau lada hitam hasil pengeringan oleh petani. Sebagai perbandingan, harga jual lada hitam dan lada putih adalah sekitar 5-7 US\$/kg. sedangkan harga jual lada hijau kering adalah 40,56 US\$/kg. harga jual lada hijau kering beku adalah 18,99 US\$/120 gr, harga jual lada hijau dalam larutan garam adalah 30,9 US\$ per kemasan 595 gr atau 16,81 US\$ per kemasan botol 638 gr, harga jual minyak lada adalah 322,51 US\$/kg, serta harga jual oleoresin adalah 53,33 US\$/lt (Risfaheri, 2012). Dengan demikian, dengan adanya pengolahan industri untuk komoditi lada, akan memberikan nilai tambah yang cukup besar.

Dampak dari adanya industri pengolahan untuk komoditi lada selain terhadap peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah produk adalah adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pengolahan lada

menjadi produk lada hijau dapat dilakukan di tingkat petani maupun industri kecil dan menengah karena teknologinya yang relatif tidak terlalu rumit. Sedangkan ekstraksi minyak lada dan oleoresin dapat dilakukan pada industri menengah dan besar. Dengan adanya industri pengolahan lada tersebut, dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru yang diasumsikan 5% dari jumlah petani lada yang ada, dengan mempertimbangkan juga pertumbuhan produksi lada. Jumlah tersebut dapat menyerap sekitar 16- 17,5% dari jumlah pengangguran terbuka (dengan basis data angkatan kerja pada tahun 2016).

Untuk mencapai sasaran di atas, maka ditetapkan program pendukung yang tersaji pada Tabel 4.21 dibawah ini.

Tabel 4. 21 Program Pengembangan Industri Pengolahan Lada Tahun 2023 - 2043

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-lain | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| I. | Program Pengembangan SDM | | | | | | | |
| A. | Peningkatan kemampuan SDM petani lada | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan dan pelatihan tentang intensifikasi tanaman lada | Distanngan | Petani lada | KUD, KIMBUN (Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan), KUAT (Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu), APLI (Asosiasi Petani Lada Indonesia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pembinaan dalam Workshop/Short course standar pasca panen lada | Distanngan, DKUP | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Peningkatan kemampuan SDM Industri Lada | | | | | | | |
| 1. | Workshop/Short course Quality Control (QC), pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri tentang teknologi pengolahan lada dan pengawasan mutunya | DKUP | Industri lada | KUD, KIMBUN, KUAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pendidikan industri lada bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah | DKUP, Distanngan | | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| | terkait dalam teknis dan manajemen industri lada | | | | | | | |
| 3. | Mendirikan sekolah/pusat pelatihan untuk bidang Teknologi Pengolahan Lada | Disdikpora, DKUP | | SMK, SMTI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| II. | Program Produksi dan Operasional Lada | | | | | | | |
| A. | Peningkatan produktivitas lada | | | | | | | |
| 1. | Intensifikasi dan ekstensi perkebunan lada (Sosialisasi intensif, penyuluhan, dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) | Distanngan | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi ketersediaan dan kontinuitas bibit unggul dan pupuk (pendirian industri pembibitan lada dan industri kompos) | Distanngan | Petani lada | UPBS (Unit Pengelolaan Benih Sumber), UKT (Unit Komersialisasi Teknologi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Pengendalian hama dan penyakit dengan menerapkan paket pengendalian terpadu | Distanngan | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Pertumbuhan pusat agribisnis lada | Distanngan | | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen lada | Distanngan, DKUP | Petani lada | KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen lada | Distanngan | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Peningkatan kualitas dari standar kadar air, kebersihan, keutuhan dan kemurnian lada | Distanngan | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| III. | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Lada | | | | | | | |
| 1. | Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan) | DKUP | Industri lada | KIMBUN KUAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi alat-alat pengolahan lada secara mekanis seperti alat pengupas, alat perontok, alat pengering, dan alat penyuling minyak | DKUP | Industri lada | KIMBUN KUAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 3. | Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir lada) | DKUP | Industri lada, Investor | PUSLIT LADA, SMK, SMTI, BPpt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IV. | Program Pemasaran dan Perdagangan Lada | | | | | | | |
| 1. | Optimalisasi media informasi berbasis online maupun konvensional secara professional sebagai sarana pemasaran | DKUP, Diskominfo | Industri Lada | KUD, KIMBUN KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Kerjasama dengan instansi terkait untuk pengembagn produk dan pasar | DKUP | Petani lada, industri lada | KIMBUN KUAT, APLI, PUSLIT LADA, BPPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Peningkatan intensitas informasi pasar melalui media yang dapat menjangkau petani | DKUP, Diskominfo | Petani lada, industri lada | KIMBUN KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Efisiensi pemasaran dengan menekan biaya tataniaga | DKUP | Petani lada, industri lada | KIMBUN KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Promosi pasar untuk ekspor melalui IPC (International Pepper Community) dan Badang Pengembangan Ekspor | DKUP | Petani lada, industri lada | KIMBUN KUAT, APLI, IPC dan Badan Pengembangan Ekspor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V. | Program Penyediaan Sumber Pembiayaan | | | | | | | |
| 1. | Fasilitasi dan promosi dan insentif investasi lada (khususnya untuk industri hilir) | DPMNaker Trans, DKUP | Industri lada, Investor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan Lembaga keuangan/bank | DKUP | Industri lada, Perbankan/ Lembaga Keuangan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Bimbingan manajemen keuangana | DKUP | Industri lada, konsultan manajemen | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| VI. | Program-program Pendukung Lainnya | | | | | | | |
| 1. | Program pembangunan infastruktur/pengelolaan lingkungan | BP4D, DPUPR, DLH, PLN, PDAM | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Program peningkatan kerja sama (antar institusi pemerintah terkait; kerja sama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan lada) | BP4D, DKUP | Industri lada, IKM | Penyedia dana riset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|
| 3. | Program pengembangan perwilayahan industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) | DP4D, DPUP, DKUP | Industri lada, (Investor) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Program pemberdayaan IKM | DKUP | IKM | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir lada) | DPMNaker Trans, DKUP | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

C. Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Industri pengolahan sawit di Kabupaten Bangka Barat hingga 2017 tercatat berjumlah 41 perusahaan yang secara umum memproduksi CPO. Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi CPO bervariasi dengan rata-rata produksi 50.364,50/tahun (DKUP, 2016). Hingga tahun 2016 terdapat 6 (enam) perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat (Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2017) dengan luas areal perkebunan sebesar 37.448,82 Ha dan luas areal perkebunan rakyat sebesar 17.699,86 Ha yang siap memasok kebutuhan bahan baku industri CPO dan hilir berikutnya. Dari perkebunan rakyatnya saja produksi kelapa sawit (tandan buah segar) mencapai 33.248,01 ton pada tahun 2016. Pembangunan industri berbasis komoditas sawit diarahkan pada jenis industri:

1. Minyak goreng,
2. Oleofood,
3. Oleochemical, dan
4. Kemurgi (bio diesel).
5. Biovatur

Sasaran industri berbasis komoditas kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut ini.

Tabel 4. 22 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023 – 2038

| No | Sasaran | Tahun | | | |
|----|--------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1. | Nilai tambah (Rp Milyar) | 300 | 385 | 500 | 550 |
| 2. | Pertumbuhan (%) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |

Tabel 4. 23 Hasil Produksi Industri Pengolaan Kelapa Sawit Tahun 2016 - 2020

| No | Perkebunan | Tahun/Ton | | | | |
|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Kelapa Sawit | 144.556,56 | 172.927,93 | 276.789,88 | 165.024,89 | 220.512,82 |

Tabel 4.23 menjelaskan bahwa produksi industri pengolahan sawit tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dalam produksi.

Dalam beberapa tahun kedepan kontribusi pertumbuhan industri sawit diperkirakan masih akan bergerak lebih besar. Pertumbuhan industri akan diarahkan pada hilirisasi secara bertahap dari pabrik CPO yang ada pada saat ini (baseline) menjadi minyak goreng kemasan, kemudian produk turunan lainnya. Pertumbuhan intensifikasi program produk dan diversifikasi lebih disebabkan hilir. Perluasan atau ekspansi lahan untuk kelapa sawit dalam jangka kurang memungkinkan karena keterbatasan luas daratan peruntukan di Kabupaten Bangka Belitung. Oleh karena itu, intensifikasi dan peremajaan kebun-kebun sawit tua menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan dan kecukupan pasokan bahan baku industri.

Industri pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya secara utama akan didorong untuk dikembangkan di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Mentok dan Kecamatan Simpang Teritip. Pertimbangan pengembangan di wilayah tersebut antara lain:

- 1) Produksi kelapa sawit perkebunan rakyat terbesar,
- 2) Produktivitas tinggi,
- 3) Mewakili sentral kelapa sawit di Kabupaten Bangka Barat.

Untuk mencapai sasaran di atas, maka ditetapkan program pendukung yang tersaji pada Tabel 4.24 dibawah ini.

Tabel 4. 24 Program Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2023- 2043

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | | |
|------------|--|----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-lain | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| I. | Program Pengembangan SDM Sawit | | | | | | | |
| A. | Peningkatan kemampuan SDM petani sawit | | | | | | | |
| 1. | Pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) | Distanngan | Petani sawit | | ✓ | | | |
| 2. | Sosialisasi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk petani | Distanngan, DKUP | Petani sawit | | ✓ | | | |
| B. | Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan sawit | | | | | | | |
| 1. | Workshop/Short course Quality Control (QC), pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri | DKUP | Industri sawit | | ✓ | | | |
| 2. | Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri | DKUP | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Kelapa Sawit | DKUP, Disdikpora | | SMK, Politeknik | ✓ | | | |
| II. | Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam Sawit | | | | | | | |
| A. | Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku sawit dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan peremajaan yang berwawasan lingkungan | | | | | | | |
| 1. | Intensifikasi dan peremajaan perkebunan sawitq (Sosialisasi intensif, penyuluhan, dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) | Distanngan | Petani sawit | SMK, Perguruan Tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi alinstan, bibit unggul dan pupuk | Distanngan | Petani sawit | Asosiasi | | | | |
| B. | Peningkatan kualitas produks pasca panen sesuai kebutuhan industri | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen lada | Distanngan, | Petani sawit | SMK, Perguruan Tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| 2. | Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen | Distanggan | Petani sawit | | | | | |
| 3. | Peningkatan kualitas dari standar kadar air, kebersihan, keutuhan dan kemurnian lada | Distanggan | Petani lada | KUD, KIMBUN, KUAT, APLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| III. | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Sawit | | | | | | | |
| 1. | Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan) | DKUP | Industri sawit | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi alat industri maju (untuk specific point, ex. Tester, etc. | DKUP | IKM | | | | | |
| 3. | Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir sawit, margarine, minyak goreng, dan oleochemical) | DKUP | Industri sawit, Investor | PPKS, BPPT, Perguruan Tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IV. | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Sawit | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional | DKUP | Industri sawit | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Kerjasama pengembangan produk dan market | DKUP | Industri sawit | Asosiasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Pengembangan 'branded' produk | DKUP | Industri sawit | Asosiasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V. | Program Penyediaan Sumber Pembiayaan | | | | | | | |
| 1. | Fasilitasi dan promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir sawit; margarine, minyak goreng dan oleochemical) | BPMNaker Trans, DKUP | Industri sawit, Investor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VI. | Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pengembangan Industri Sawit | | | | | | | |
| A. | Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan | BP4D, DPUPR, DISPERKIM HUB, PLN, PDAM, dll. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Program peningkatan kerja sama (antar institusi pemerintah terkait; kerja sama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan sawit) | BP4D, DKUP | Industri sawit, IKM | Donor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------|--|---|---|---|---|
| C. | Program pengembangan Kawasan Industri | BP4D, PUPR, DKUP | Industri (Investor) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D. | Program pemberdayaan IKM | DKUP | IKM | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E.. | Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir sawit) | DKUP | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

4) Industri Pengolahan Karet

Potensi pengolahan karet akan sangat tergantung pada potensi produksi karet mentah itu sendiri. Karet mentah dapat diolah menjadi crumb rubber sebagai produk olahan pertama sebelum diolah menjadi produk turunan karet lainnya. Produksi karet mentah berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah meningkat artinya pengembangan olahan karet juga potensi dapat dikembangkan dengan kondisi seperti ini. Jumlah produksi karet mentah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut ini.

Tabel 4. 25 Produksi Karet Mentah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 (ton)

| Kecamatan | 2016 |
|----------------------|-----------|
| Kelapa | 6.285,50 |
| Tempilang | 2.230,40 |
| Mentok | 1.023,60 |
| Simpang Teritip | 3.116,00 |
| Jebus | 1.243,4 |
| Parittiga | 687,30 |
| Total Produksi Karet | |
| 2016 | 14.636,20 |
| 2015 | 13.982,90 |

Tabel 4. 25 menjelaskan bahwa produksi karet mentah menurut kecamatan di kabupaten Bangka Barat tahun 2016. Produksi tertinggi pada kecamatan Kelapa dengan total produksi 6.285,50 ton dan produksi terendah pada Kecamatan Parittiga 687,30 ton.

Pembangunan industri berbasis komoditas karet diarahkan pada jenis industri:

1. Industri compound/ crumb rubber
2. Lateks Pekat dan Industri alat-alat Kesehatan

3. Industri barang dari karet lainnya
4. Industri kayu karet (board/ furniture)

Tabel 4. 26 Sasaran industri berbasis komoditas karet

| No | Sasaran | Tahun | | | |
|----|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
| 1. | Nilai tambah (Rp Milyar) | 90.35 | 94.96 | 99.81 | 104.90 |
| 2. | Pertumbuhan (%) | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 3. | Nilai ekspor (juta US\$) | 97,807 | 108,566 | 121,594 | 139,833 |
| 4. | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 185 | 194 | 204 | 214 |
| 5. | Nilai investasi (Rp Milyar) | 272.98 | 286.9 | 301.5 | 316.9 |

Untuk mencapai sasaran diatas maka disusun program pengembangan industri yang berbasis dasar karet yang dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut ini.

Tabel 4. 27 Program Pengembangan Industri Pengolahan Karet Tahun 2023 – 2043

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | | |
|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-lain | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| I. | Program Pengembangan SDM Karet | | | | | | | |
| A. | Peningkatan kemampuan SDM petani karet | | | | | | | |
| 1. | Training/diklat intensifikasi perkebunan | Disbun | Petani karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | | |
| 2. | Workshop/short course standar pasca panen | Disbun, DKUP | Petani karet | GAPKINDO, SMK–SMNTI | ✓ | ✓ | | |
| B. | Peningkatan kemampuan SDM industri karet | | | | | | | |
| 1. | Workshop/Short course Quality Control (QC), pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri | DKUP | Industri karet | GAPKINDO, SMK-SMNTI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri karet | DKUP | | SMK SMNTI POLNEP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| II. | Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam Karet | | | | | | | |
| A. | Penguatan pasokan dan kontinuita bahan baku karet dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi, dan ekstensi yang berwawasan lingkungan | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | Intensifikasi, rejuvenasi, dan ekstensi perkebunan karet (Sosialisasi intensif, penyuluhan, dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) | Disbun | Petani karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi alinstan, bibit unggul dan pupuk | Disbun | Petani karet | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Peningkatan kualitas produk pasca panen sesuai kebutuhan industri | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen termasuk untuk produksi lateks tepat | Disbun, DKUP | Petani karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen | Disbun | Petani karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | | ✓ |
| III. | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Karet | | | | | | | |
| 1. | Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan) | DKUP | Industri karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Fasilitasi alat industri maju (untuk specific point, ex. Tester, dll) | DKUP | Industri karet | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 3. | Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir karet lateks pekat dan industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya) | DKUP | Industri karet, Investor | PUSLIT KARET, BARISTAN INDUSTRI, UNTAN, POLNEP, SMK, SMTI, BPPT, BBPKKP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IV. | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Karet | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional | DKUP | Industri karet | GAPKINDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Kerjasama pengembangan produk dan market | DKUP | Petani karet, Industri karet | GAPKINDO, PUSLT KARET, BATAN, BPPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V. | Program Penyediaan Sumber Pembiayaan | | | | | | | |
| 1. | Fasilitasi dan promosi dan insentif investasi karet (khususnya untuk industri hilir karet lateks pekat dan industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya) | BPMPTSP, DKUP | Industri karet, Investor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|
| 2. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan Lembaga finansial/bank | DKUP | Industri karet | Perbankan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Bimbingan manajemen finansial | DKUP | Industri karet | Perbankan | | | | |
| VI. | Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pengembangan Industri Karet | | | | | | | |
| A. | Program pembangunan infrastruktur/pengelolaan lingkungan | BAPPEDA, DPUPR, BLHD, PLN, PDAM, dll | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. | Program peningkatan kerja sama (antar institusi pemerintah terkait; kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan karet) | BAPPEDA, DKUP | Industri karet, IKM | Donor | ✓ | ✓ | | |
| C. | Program pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI Mandor | BAPPEDA, DPUPR, DKUP | Industri (Investor) | | ✓ | ✓ | | |
| D. | Program pemberdayaan IKM | DKUP | IKM | | ✓ | ✓ | | |
| E. | Program Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir karet) | BPMPTSP, DKUP | | | ✓ | ✓ | | |

5. Industri Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Industri pengelolaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan dibidang pertambangan dan energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada.

Sektor pertambangan yang selama ini penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Produk hilir logam timah dan aplikasinya sebanyak 355,12 ribu ton total konsumsi logam timah dunia pada tahun 2020. *Tin solder* sebesar 51%, *tin chemical* 17%, *tin plate* 12%, *lead acid batteries* sebesar 7%, *copper alloys* sebesar 5%, dan *others* sebesar 8%.

Peluang pasar untuk teknologi timah diperkirakan naik hingga 2030 terkait *tin solder*, *tin plate*, *tin chemical*, dan *batteries*. Hal ini terkait pemicu secara global yang berkaitan dengan teknologi dan perubahan cuaca. Dampaknya akan berpengaruh terhadap berbagai sektor terkait sektor komunikasi, energi, transportasi, manufaktur dan lingkungan.

Proyeksi permintaan logam timah didasarkan pada *supercycle* teknologi terkait *solar ribbon*, teknologi berbasis 5G, elektronik kendaraan listrik, penggunaan *tin-copper* elektronik, dan penggunaan batere lithium-ion. Pertumbuhan jangka panjang dari 2% diprediksi akan menjadi dua kali lipat senilai 3-4%, meliputi timing & skala *supercycle* solder tidak pasti, bahan kimia dalam pertumbuhan yang stabil, *tinplate* datar atau menurun, mungkin mengalami pergeseran garis dasar, *lead-acid* menuju ke substitusi, dan timah-tembaga tumbuh lebih kuat dari dasar yang rendah. Akan tetapi permintaan mungkin mungkin dibatasi karena terkait batasan kendala pasokan: timah atau bahan lainnya, dan risiko geopolitik, makro, energi tinggi.

Proses produksi tin chemical yaitu dimulai dari *tin ingot* 99.9% → *SnCl₄ Plant* → *Intermediate Plant* → *Tin Stabilizer plant* → *Bankastab MT-6XX & MT-7XX* → *Tin One Pack* → terdiri dari *Tin Stabilizer, modifier, lubricant, filler, pigment, plasticizer, and additive* → menjadi PVC Industri dalam produk PVC.

Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada tabel 4.28 dan 4.29 di bawah ini.

Tabel 4. 28 Sasaran industri berbasis komoditas timah

| No | Sasaran | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Ke1 | Ke2 | Ke3 | Ke4 | Ke5 |
| 1 | Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “ <i>good mining practices</i> ” | 50% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| 2 | Meningkatkan pertambangan mineral yang menerapkan “ <i>good mining practices</i> ” | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% |
| 3 | Meningkatnya potensi cadangan | 16,28% | 32,55% | 48,83% | 65,10% | 81,38% |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | mineral logam, bukan logam dan bantuan | | | | | |
| 4 | Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi | 6,28% | 6,83% | 6,48% | 6,85% | 6,86% |
| 5 | Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50% | 60% | 65% | 70% | 80% |
| 6 | Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan | 17,9% (70 Miliar) | 38,4% (80 Miliar) | 58,9% (80 miliar) | 79,4% (80 Miliar) | 100% (80 Miliar) |
| 7 | Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS | 21,7% (460 Ribu Barel) | 42,2% (440 Ribu Barel) | 62,2% (420 Ribu Barel) | 81% (400 Ribu Barel) | 100% (400 Ribu Barel) |
| 8 | Meningkatnya pendapatan daerah sektor lain yang sah | 16,5% (1,5 Miliar) | 35,32% (1,7 Miliar) | 56,1% (1,9 Miliar) | 78% (2 Miliar) | 100% (2 Miliar) |
| 9 | Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP | 15% | 13% | 12% | 10% | 9% |
| 10 | Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi | 20% (10 Miliar) | 40% (10 Miliar) | 60% (10 Miliar) | 80% (10 Miliar) | 100% (10 Miliar) |

Tabel 4. 29 Tabel Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Jenis Bahan Galian | POTENSI | |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 |
| 1 | Pasir Kwarsa | 1.482.301 ton | 848.357.778 |
| 2 | Pasir Bangunan | 666.188,06 ton | |
| 3 | Kaolin | 205.487,50 ton | 48.355.484 |
| 4 | Granit | 55.508,29 m3 | 13.448.692.345 |
| 5 | Diabas | 89.551,12 m3 | |

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota pada sektor ESDM tidak bisa dilakukan karena sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diambil alih Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing Kabupaten sudah hilang (dibubarkan).

Tantangan Industri Hilir terkait dengan bahan baku logam timah dan material impor yang merupakan komponen biaya terbesar yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahan Baku. Terkait fluktuasi harga logam timah dan terbatasnya jumlah produsen bahan kimia impor.
- 2) Limbah Cair. Proses produksi 1 ton tin stabilizer juga akan menghasilkan sekitar 1 ton limbah cair yang perlu diolah khusus.
- 3) Delivery Produk Solder. Delivery produk solder beragam mulai dari minimal 500 kg per customer (dalam negeri) dan minimal 5 mt per customer (luar negeri/ekspor).
- 4) Industri Pendukung. Peralatan pabrik masih impor, teknologi pendukung di dalam negeri belum memadai, dan riset dan pengembangan produk hilir logam timah masih terbatas.
- 5) Keuangan. Depresiasi investasi menambah beban harga jual, mengurangi kemampuan bersaing.
- 6) Perilaku Pasar. Harga jual dipengaruhi oleh harga logam timah dan supply demand produk hilir, dan jangka waktu pembayaran relative panjang, 60-90 hari.

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Kabupaten Bangka Barat merupakan bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana dalam RIPIN, Provinsi Bangka Belitung tertuang tergabung dalam satu Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Meskipun Provinsi Bangka Belitung tidak menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam RIPIN, namun perlu memberikan daya dukung pada WPI Sumatera Bagian Selatan. Apalagi Kabupaten Bangka Barat terletak pada posisi yang dekat dengan Propinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks Industri Prioritas Nasional, Industri yang sesuai di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah (1) industri pangan dan (2) industri hulu agro.

3. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, dan transportasi.

Terdapat 2 (dua) kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka Barat seperti yang disajikan pada Bab II. Dalam Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka

Barat tahun 2014-2034, disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri (KPI) untuk Kabupaten Bangka Barat yaitu:

1. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) di
2. Tanjung Ular seluas kurang lebih 1.275 hektar, 2. Kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian seluas ± 139 ha.

KIPT Tanjung Ular ditetapkan sebagai Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut kepentingan ekonomi.

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KI) pembangunan industri daerah harus memperhatikan Industri Kecil Menengah (IKM) daerah. Maka harus ada program yang terkait dengan pengembangan IKM melalui dimaksud. fasilitasi sentra-sentra IKM

Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra juga berkembang.

Di Kabupaten Bangka Barat diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) Sentra Baru IKM disamping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang sudah ada sebagai sebuah Sentra di Kabupaten.

Pada Tabel 4.30 berikut ini dapat dilihat program - program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Bangka Barat yang perlu dimasukkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri.

Tabel 4. 30 Program Prioritas Pengembangan Pewilayahan Industri di Kabupaten Bangka Barat

| No | Progam | Tahun | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| A. | Pengembangan KPI | | | | |
| 1 | Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI di Kabupaten Bangka Barat termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait | | | | |
| 3 | Implementasi program, evaluasi, dan penyelenggaraan berkelanjutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | Pembangunan KI | | | | |
| 1 | Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Kabupaten Bangka Barat (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan) | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|
| 2 | Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya | | | | |
| 3 | Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas | | | | |
| 4 | Percepatan pembangunan sarana dan pembebasan lahan utama KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi | ✓ | | | |
| 5 | Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI | ✓ | | | |
| 6 | Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya | ✓ | | | |
| C | Pengembangan Sentra IKM | | | | |
| 1 | Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya | ✓ | | | |
| 2 | Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Insetif khusus untuk IKM dalam sentra | ✓ | ✓ | ✓ | |

5. Wilayah Pengembangan Industri Unggulan

Setelah ditetapkan komoditas industri unggulan, selanjutnya ditentukan wilayah yang akan menjadi pusat pengembangannya. Untuk menetapkan pusat pengembangan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain:

1. Ketersediaan bahan baku (kuantitas dan kontinuitas),
2. Kemudahan akses bahan baku,
3. Sudah ada industri menengah/besar yang dikembangkan,
4. Mempunyai potensi untuk dikembangkan industri besar,
5. Dukungan infrastruktur yang memadai,
6. Dukungan energi yang memadai,
7. Peluang akses pembiayaan.

Rencana pengembangan wilayah industri unggulan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut ini.

Tabel 4. 31 Rencana Wilayah Pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten Bangka Barat

| No. | Komoditas Industri Unggulan Provinsi | Rencana Wilayah Pengembangan |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pengolahan Ikan | Parittiga, Simpang Teritip, Mentok |
| 2. | Pengolahan Karet | Kelapa, Simpang Teritip |
| 3. | Pengolahan Lada | Kelapa, Simpang Teritip, Tempilang |
| 4. | Pengolahan Kelapa Sawit | Kelapa, Mentok, Tempilang |

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri yang relevan diperlukan untuk memberikan daya dukung yang memadai bagi pertumbuhan industri daerah. Sumber daya di sini bukan hanya kekayaan alam (SDA). melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi, dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber manusia industri dengan daya kualifikasi dan kompetensi yang relevan dalam jumlah memadai sangat diperlukan untuk mendukung Industri yang kuat. Oleh karena itu harus ada program program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud. Program pengembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut ini.

Tabel 4. 32 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023- 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja (SDM) khususnya lada, karet, sawit, hasil laut dan perikanan dan tanaman pangan | | | | |
| a. | Training/diklat intensifikasi perkebunan | ✓ | ✓ | | |
| b. | Workshop/short course standar pasca panen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri | | | | |
| a. | Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| b. | Pendidikan industri khususnya lada, karet, sawit, dan hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan bagi aparat daerah/Training of Trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/Lembaga komoditas dan industri unggulan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma khusus komoditas karet, sawit, lada. Hasil laut dan perikanan, kayu, dan tanaman pangan | ✓ | ✓ | | |

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran- sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini. Kabupaten Bangka Barat memiliki berbagai sumber daya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Kabupaten Bangka Barat ini, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor Perkebunan dan Perikanan dengan komoditas utamanya yaitu lada, karet, kelapa sawit, dan hasil laut/perikanan. Selain itu komoditas kayu tanaman pangan juga sangat penting dan potensial untuk dikembangkan menjadi industri pangan. Maka terhadap komoditas utama tersebut di atas haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan terus menerus (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan agar pemanfaatan sumber daya alam akan optimal. Program-program terkait pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut ini.

Tabel 4. 33 Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tahun 2023-2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), peremajaan yang berwawasan lingkungan, khususnya lada, karet, sawit, hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan | | | | |
| a. | Program intensifikasi dan peremajaan perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| b. | Fasilitas alinstan, bibit unggul dan pupuk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| c. | Pengendalian hama dan penyakit tanaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri | | | | |
| a. | Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| b. | Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| c. | Monitoring hasil dan standarisasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

3. Pengembangan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Oleh karena itu harus ada program - program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan teknologi industri dapat dimanfaatkan. Program program terkait pengembangan teknologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.34 berikut ini.

Tabel 4. 34 Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2023 - 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan) pada industri pengolahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industry) | ✓ | | | ✓ |
| 3 | Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, IPB, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

4. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus- menerus. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya inovasi dan kreatifitas industri tersebut. Program program terkait pengembangan inovasi dan kreatifitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.35 berikut ini.

Tabel 4. 35 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2023 – 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Pemanfaatan media informatika dan e-business secara professional (ternasuk informasi harga untuk petani, dll) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Diseminasi teknologi tepat guna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Pengembangan ‘branded’ produk Bangka Belitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. Dukungan Pembiayaan Industri

Masalah pembiayaan seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang industri. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan adanya pembiayaan industri agar industri tidak mengalami kendala pembiayaan. Program program terkait pembiayaan industri tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.36 berikut ini.

Tabel 4. 36 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2023 - 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Fasilitasi dan insentif investasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan Lembaga finansial/bank dan Non Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Bimbingan/training manajemen finansial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Ketersediaan Sarana dan prasarana industri sangat menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan industri di suatu daerah. Sarana dan prasarana industri perlu dibangun dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri pengolahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan sarana dan prasarana industri meliputi pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri. Pembahasannya lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Lingkungan

Seperti diketahui bahwa setiap industri pengolahan pasti akan menghasilkan limbah industri. Namun kedepannya diharapkan limbah tersebut tidak menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Untuk menekan dampak negatif dari limbah industri tersebut perlu dilakukan program-program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka Barat seperti terlihat pada Tabel 4.37 berikut ini.

Tabel 4. 37 Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Pengendalian pencemaran lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Peningkatan sistem pengelolaan limbah dan sampah industri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Peningkatan pelayanan IPAL dan drainase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Penghijauan wilayah industri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengembangan TPA regional dan TPA skala kecamatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

2. Lahan

Untuk merealisasikan rencana pembangunan industri kabupaten diperlukan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi kawasan industri atau kawasan peruntukkan industri. Agar kawasan tersebut tidak menjadi masalah dan menghambat dalam pengembangan industri, maka perlu ada program-program tertentu terkait dengan lahan peruntukkan industri seperti terlihat pada Tabel 4.38 berikut ini.

Tabel 4. 38 Program Penyediaan Lahan untuk Industri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Sosialisasi tentang lahan peruntukkan industri dan ketentuan-ketentuannya | ✓ | | | |
| 2 | Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana | ✓ | | | |
| 3 | Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan | | | | |
| 4 | Implementasi penggunaan lahan untuk kawasan industri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Kalian | | ✓ | ✓ | |

3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pada BAB II telah diuraikan mengenai data energi dan kelistrikan di Kabupaten Bangka Barat. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaringan listrik dan air yang cukup baik. Namun demikian, untuk memastikan pasokan listrik pengolahan yang tetap cukup untuk industri akan dikembangkan, perlu dilakukan program-program yang dapat memastikan

hal tersebut. Program-program terkait jaringan energi dan kelistrikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.39 berikut ini.

Tabel 4. 39 Program Peningkatan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2023 – 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Peningkatan dan perluasan transmisi dan distribusi jaringan listrik | ✓ | | | |
| 2 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap | | | | |
| 3 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | | | | |

4. Jaringan Telekomunikasi

Pada BAB II telah diuraikan mengenai data telekomunikasi di Kabupaten Bangka Barat. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaringan telekomunikasi yang sangat baik. Jaringan telekomunikasi sangat penting Untuk memperlancar komunikasi dalam operasional industri, diperlukan media komunikasi tulisan (surat, surat kabar, majalah, dan lain-lain) dan juga media komunikasi yang bersifat audio-visual (radio, televisi, dan lain-lain). Selain itu, yang perlu ditingkatkan kapasitas layanannya adalah aspek telekomunikasi melalui media telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Saat ini akses terhadap internet sangat penting dalam kegiatan usaha, terlebih karena pemasaran untuk produk industri yang dihasilkan banyak menggunakan e-marketing.

Dengan menggunakan internet, berbagai informasi yang menunjang proses produksi juga dapat diperoleh dengan mudah. Namun demikian, untuk memastikan bahwa jaringan telekomunikasi tetap tersedia untuk industri pengolahan yang akan dikembangkan, perlu dilakukan program-program yang dapat memastikan hal tersebut. Program-program terkait jaringan telekomunikasi yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.40 berikut ini.

Tabel 4. 40 Program Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2023 - 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Peningkatan kapasitas pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) | ✓ | | | ✓ |
| 2 | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan Lembaga finansial/bank dan Non Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Bimbingan/training manajemen finansial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. Jaringan Sumber Daya Air

Pada BAB II telah diuraikan mengenai data mengenai sumber daya air di Kabupaten Bangka Barat. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaringan telekomunikasi yang cukup baik. Fasilitas Jaringan Air di Kabupaten Bangka Barat dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kedepannya diharapkan PDAM dapat meningkatkan jaringan pelayanan air bersih ke semua bidang. Untuk memastikan bahwa jaringan air bersih tetap tersedia untuk industri pengolahan yang akan dikembangkan, perlu dilakukan program-program yang dapat memastikan hal tersebut. Program- program terkait jaringan air bersih yang dapat pembangunan industri di Kabupaten Bangka Barat dilakukan untuk menjamin kelangsungan dapat dilihat pada Tabel 4.41 berikut ini.

Tabel 4. 41 Program Peningkatan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2023 - 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Peningkatan pelayanan air bersih (volume dan jangkauan layanan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

6. Jaringan Sanitasi

Dalam pembangunan berbasis industri, peningkatan dan perbaikan terhadap jaringan sanitasi juga perlu mendapatkan perhatian. Selain pengelolaan lingkungan yang baik, pengelolaan sanitasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap kesuksesan pengelolaan industri. Dengan sanitasi yang baik, lingkungan industri menjadi bersih dan sehat. Beberapa program untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.42 berikut ini.

Tabel 4. 42 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 – 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Peningkatan pelayanan sanitasi total berbasis masyarakat (akses terhadap air bersih, dll) | ✓ | | | ✓ |
| 2 | Peningkatan Program Peningkatan Percepatan Sanitasi (PPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Peningkatan akses jamban sehat | ✓ | | | |
| 4 | Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan | | | | ✓ |

7. Jaringan Transportasi

Pengembangan sarana prasarana yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis pengolahan industri yaitu pembangunan jaringan transportasi. Di Kabupaten Bangka Barat jenis transportasi yang menunjang pembangunan industri adalah meliputi transportasi darat dan laut yaitu pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan. Dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 terdapat indikasi program terkait pengembangan jaringan jalan, jembatan, terminal, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Program program pembangunan yang terkait dengan pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.43 berikut ini.

Tabel 4. 43 Program Pembangunan Transportasi di Kabupaten Barat Tahun 2023 – 2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Perbaiki kondisi jalan yang rusak dan rusak berat | ✓ | | | ✓ |
| 2 | Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri) | ✓ | | | |
| 3 | Perbaikan dan pemeliharaan jembatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Perluasan Pelabuhan Tanjung Kalian | ✓ | ✓ | | |
| 5 | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular menjadi pelabuhan industri | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 6 | Peningkatan dan pengembangan jalan khusus KIPT | ✓ | | | |
| 7 | Pembangunan jembatan Tanjung Ru – Tanjung Gudang | | | | |
| 8 | Pembangunan Bandar Udara Khusus Perintis | ✓ | | | |
| 9 | Pemeliharaan dan Peningkatan fasilitas udara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

8. Fasilitas Penunjang

Aspek pergudangan merupakan aspek penting lain yang perlu diprioritaskan pembangunan atau pengembangannya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan berbasis industri. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai data bahan baku, proses produksi, pasar, dan lain-lain perlu dilakukan pembangunan sistem informasi industri. Layanan informasi industri yang telah ada juga perlu ditingkatkan kualitasnya dan selalu diperbaharui kebaruan data dan sistemnya. Untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan dapat bermutu tinggi sehingga dapat bersaing di pasar nasional maupun global, perlu dibangun balai-balai penelitian termasuk laboratorium untuk pengujian produk. Pemenuhan kualitas produk sesuai dengan standarisasi industri yang berlaku dapat dicapai melalui kerjasama antar instansi maupun dengan pihak eksternal. Program yang terkait dengan program pembangunan pengembangan fasilitas penunjang di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.44 berikut ini.

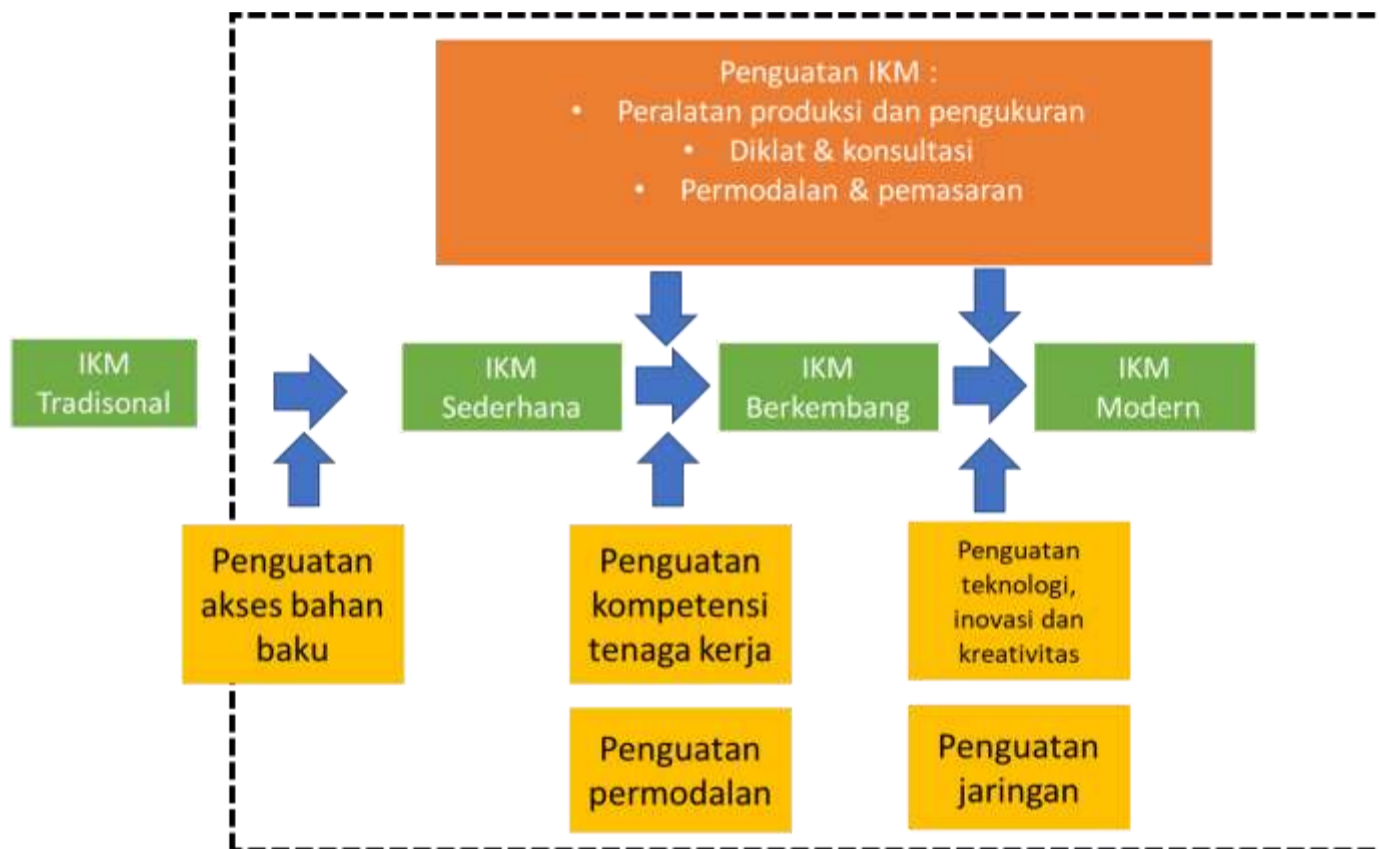
Tabel 4. 44 Program Pembangunan Fasilitas Penunjang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023– 2043

| No | Progam | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kualitas gudang | ✓ | | | ✓ |
| 2 | Pembangunan Sistem Informasi Industri | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 3 | Peningkatan layanan informasi industri dan updating | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Pembangunan Balai Besar termasuk Laboratorium Produk Hasil Industri | | | | |
| 5 | Penentuan standarisasi industri dan Kerjasama penerapan standarisasi industri | ✓ | | | |

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Pengembangan industri kabupaten terfokus pada Industri Kecil dan Menengah Peran IKM di Kabupaten Bangka Barat sangat besar khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata ke tengah masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kewenangan pembinaan Industri Kecil berada di Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Strategi pemberdayaan IKM di Kabupaten Bangak Barat merujuk pada skema penguatan IKM yang diadopsi dari RIPIN 2015-1035. Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4. 2 Skema Tahapan Pengembangan IKM

Beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4.45 berikut ini.

Tabel 4. 45 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 |
| 1 | Pendataan IKM di Kabupaten Bangka Barat (Updating) & perating-an IKM untuk memudahkan pengembangan program pembinaan yang terfokus | ✓ | | | |
| 2 | Fasilitasi permodalan bagi IKM & pendirian Lembaga penjamin pinjaman bagi IKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Peningkatan kapasitas manajerial pengusaha IKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Fasilitasi alat tepat guna sesuai kebutuhan IKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 5 | Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Peningkatan kualitas produksi IKM olahan pangan dengan fasilitasi training & standarisasi mutu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Peningkatan inovasi dan produksi produk-produk olahan pangan khas Bangka Belitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Peningkatan promosi IKM pengolahan bahan pangan dengan penguatan pada Country of Origin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengembangan linkage dengan IBS (Kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan untuk membina pelaku IKM | | | | |
| 11 | Pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah di setiap Kecamatan | ✓ | | | |

Secara umum program-program terkait industri yang terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.46 berikut ini.

Tabel 4. 46 Program Pemberdayaan Industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - 2026

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN | Satuan | Capaian Setiap Tahun | | | | | Target Akhir RPJMD |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| I | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,8 | 5,26 | 5,2 | 7,13 | -5,43 | 5,05 |
| | Indeks Pembangunan Manusia | Angka indeks | 67,60 | 67,94 | 68,68 | 69,05 | 69,08 | 72,23 |
| | Persentase Penduduk Miskin | % | 2,74 | 2,98 | 3,05 | 2,67 | 2,70 | 2,85 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | Angka | - | 4,23 | 3,11 | 2,85 | 4,12 | 5,65 |
| | PDRB Perkapita | Ribu rupiah | 61.038 | 64.565 | 66.108 | 66.378 | 61.617 | 70.428 |
| | | | | | | | | |
| II | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| | Urusan Pendidikan | | | | | | | |
| | Peringkat ujian Nasional se- provinsi Bangka Belitung (SD) | Peringkat | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 |
| | Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung (SMP) | | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 |
| | Angka rata-rata lama sekolah kabupaten | Tahun | 6,89 | 7,06 | 7,18 | 7,21 | 7,22 | 8,26 |
| | Angka Harapan lama Sekolah | Tahun | 11,48 | 11,49 | 11,50 | 11,52 | 11,53 | 13,35 |
| | Kesehatan | | | | | | | |
| | Angka Harapan hidup | Tahun | 69,52 | 69,56 | 69,73 | 69,99 | 70,06 | 69,99 |
| | Pekerjaan umum dan penataan ruang | % | - | 62,86 | 68,57 | 80 | 91,67 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air | | | | | | | |
| | Persentase Ruang terbuka hijau | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 4 | 2,90 |
| | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | |
| | Persentase Penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak | % | 82,68 | 82,66 | 86,94 | 93,79 | 94,61 | 95 |
| | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | | | | |
| | Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 112,07 | 67,24 | 26,32 | 31,58 | 63,16 | 84,85 |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 67,04 | 68,07 | 64,73 | 66,29 | 67,34 | 68 |
| | Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan | % | N/A | 9,38 | 10,94 | 12,5 | 15,2 | 11 |
| | Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), Komunitas (<i>Civil Society Organization/CSO</i>) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara baik | Unit | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik | % | 19,18 | 19,18 | 38,36 | 28,04 | 23,42 | 70 |
| | Persentase Cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu | % | 7,8 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 10,61 | 19 |
| | Persentase Luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif | % | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | Persentase sumber air yang telah dikonservasi | % | 16,26 | 26,02 | 26,02 | 33,33 | 39,02 | 28 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| | Pertase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang | % | 70,59 | 73,69 | 99,09 | 12 | 44,44 | 100 |
| | Kepemudaan & Olahraga | | | | | | | |
| | Prestasi olahraga Pendidikan di tingkat Provinsi | Peringkat | 7 (POPDA) | 6 (Kejurda) | 7 (POPDA) | 6 (Kejurda) | 3 (POPDA) | 3 (POPDA) 3 (Kejurda) |
| | Peringkat olahraga prestasi di tingkat Provinsi | Peringkat | 7 (POPDA) | 6 (Kejurda) | 7 (Pemprov) 7 (POPDA) | 6 (Kejurda) | 3 (POPDA) | 3 (POPDA) |
| | Sekretariat Daerah | | | | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 63,37 | 60,65 | 74,87 | 45,24 | 45,94 | 70 |
| | Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar | % | - | - | 90,27 | 77,93 | 92,59 | 80 |
| | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas pelayanan publik | Nilai | 80,36 | 81,62 | 81,32 | 78,62 | 80,98 | 85 |
| | Kuangan | | | | | | | |
| | Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) | % | 6,30 | 9,40 | 10,15 | 7,39 | 7,77 | 9,00 |
| | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WDP | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| | Pengawasan | | | | | | | |
| | Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 60,24 | 65,44 | 68,65 | 69,24 | 69,82 | 70 |
| | Pekerjaan umum dan penataan ruang | | | | | | | |
| | Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis | % | 9,13 | 23,39 | 37,89 | 51,35 | 51,35 | 94,76 |
| | Perhubungan | | | | | | | |
| | Indeks konektivitas kabupaten | Indeks | 1,2 | 1,21 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | Penanaman Modal | | | | | | | |
| | Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA,PMDN) | Milyar | 117,115 | 120,782 | 462,456 | 642,238 | 417,08 | 600 |
| | Koperasi, Usaha kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan unit usaha mikro | % | - | 3,29 | 1,87 | 2,55 | 5,60 | 24,782 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah | % | 12,87 | 7,83 | 6,14 | 5,55 | 5,27 | 2,718 |
| | Peningkatan Skala usaha Umi | % | - | - | 86,74 | 7,07 | 0,04 | 2,50 |
| | Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan (Industri makanan olahan/ kuliner) | Ton/Tahun | 3.121,08 | 3.133,75 | 3.161,96 | 3.244,49 | 2.133,29 | 3.152,18 |
| | Kapasitas usaha industri kecil dan menengah (Industri Kerajinan) | Unit/Tahun | 191.940 | 192.852 | 198.029 | 203.721 | 99.556,00 | 222,492 |
| | Jumlah Ragam Usaha/Produk Umi | Unit | 86 | 100 | 1201 | 137 | 151 | 150 |
| | Jumlah Ragam usaha industri kecil dan menengah | Unit | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 |
| | Jangkauan pasar Produk UMI | % | DK=100 | DK=99,66 AK=0,04 AP=0,34 | DK=98,46 AK=1,19 AP=0,15 | DK=86,46 AK=14,76 AP=0,44 | DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55 | DK=98,5 |
| | Jangkauan pasar produk unggulan industri menengah kecil dan menengah | % | DK=100 | DK=95,41 AK=0,43 AP=4,16 | DK=95,86 AK=1,07 AP=3,07 | DK=95,9 AK=1,16 AP=2,94 | DK=96,03 AK=1,21 AP=2,76 | DK=98 |
| | Kontribusi UMI, Industri kecil dan menengah terhadap PDRB | % | 8,87 | 9,26 | 9,33 | 9,95 | - | 9,78 |
| | Kebudayaan | | | | | | | |
| | Persentase benda, situs, Kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata | % | 28,16 | 33,64 | 44,23 | 50,00 | 35,58 | 42 |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| | Nilai produksi perikanan tangkap | Juta rupiah | 239.730 | 449.027 | 547.851 | 591.662 | 632.902 | 633.269 |
| | Nilai produksi perikanan budidaya air tawar | Juta rupiah | 597 | 635 | 1.697 | 2.290 | 2.747 | 7.520 |
| | Nilai produksi perikanan budidaya air laut | Juta rupiah | 6.548 | 1.990 | 2.314 | 8.599 | 30.534 | 7,982 |
| | Pertanian | | | | | | | |
| | Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan | Juta rupiah | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 1,02 | 1,4 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Nilai Produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat | Milyar rupiah | 940 | 620 | 657 | 394 | 592 | 4.069 |
| | Nilai produksi ternak ruminasia | Juta rupiah | 12.894 | 18.227 | 31.651 | 37.720 | 32.264 | 35.525 |
| | Nilai produksi ternak unggas | Juta rupiah | 9.772 | 21.731 | 33.659 | 32.213 | 47.417 | 22.934 |
| | Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas | % | 13,72 | 11,61 | 15,85 | 11,55 | N/A | 4,5 |
| | Persentasen peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) | % | 20.000 unit usaha | 6,39 | 8,62 | 1,44 | 5,94 | 1,45 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 ini berisikan tentang gambaran kondisi Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 khususnya terkait dengan perindustrian serta program-program terkait dengan perindustrian yang akan dilaksanakan selama 20 tahun kedepan yaitu Tahun 2023 sampai Tahun 2043 yang merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 ini mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Industri di Kabupaten Bangka Barat. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.



LAPORAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

RPIK

KABUPATEN BANGKA BARAT

2023-2043

HAN TANJUNG



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Rencana Induk Pengembangan Kabupaten Bangka Barat
Bidang Unggulan : Kemaritiman
Fakultas/Jurusan : Pertanian Perikanan dan Biologi/ Akuakultur
Peneliti : Dr Reniati, Dr Endang Bidayani, dan Dr Vebtas Vili
Biaya Penelitian : Rp 65.000.000,-
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Barat
Lama kegiatan : 6 bulan
Sumber dana : Pemerintah Kabupaten Bangka Barat


a.n. Ketua LPPM UBB
Sekretaris LPPM



Eva Utami

NI PPPK. 197404292021212003

Balunjuk, November 2022
Tim Peneliti,



Dr Endang Bidayani

NI PPPK. 197803102021212008